

**EFISIENSI PENGELUARAN PEMERINTAH PADA SEKTOR
PENDIDIKAN DAN KESEHATAN DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTATAHUN 2013 - 2015**

SKRIPSI



Oleh :

Nama : Asprilla Dedy Perdana
Nomor Mahasiswa : 14313417
Program Studi : Ilmu Ekonomi

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
FAKULTAS EKONOMI YOGYAKARTA**

2017

**EFISIENSI PENGELUARAN PEMERINTAH PADA SEKTOR
PENDIDIKAN DAN KESEHATAN DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA TAHUN 2013 - 2015**

SKRIPSI

Disusun dan diajukan untuk memenuhi syarat ujian akhir
guna memperoleh gelar sarjana jenjang strata 1
Program studi Ilmu Ekonomi,
pada Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Indonesia

Oleh :

Nama : Asprilla Dedy Perdana
Nomor Mahasiswa : 14313417
Program Studi : Ilmu Ekonomi

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
FAKULTAS EKONOMI YOGYAKARTA
2017**

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertandatangan dibawah ini bahwa skripsi ini telah ditulis dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang dapat dikategorikan dalam tindakan plagiasi seperti dimaksud dalam buku pedoman penulisan skripsi Program Studi Ilmu Ekonomi FE UII. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka Saya sanggup menerima hukuman/sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku.

Yogyakarta, 11 Desember 2017

Penulis



Asprilla Dedy Perdana

PENGESAHAN SKRIPSI

EFISIENSI PENGELUARAN PEMERINTAH PADA SEKTOR PENDIDIKAN

DAN KESEHATAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

TAHUN 2013 - 2015

Nama : Asprilla Dedy Perdana

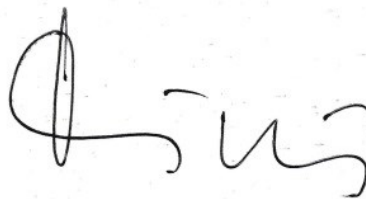
Nomor Mahasiswa : 14313417

Program Studi : Ilmu Ekonomi

Yogyakarta, 11 Desember 2017

Telah disetujui dan disahkan oleh

Dosen Pembimbing,



Diana Wijayanti, S.E., M.Si.

BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR /SKRIPSI

SKRIPSI BERJUDUL

**EFISIENSI PENGELUARAN PEMERINTAH SEKTOR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN
TAHUN 2013-2015 DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Disusun Oleh : **ASPRILLA DEDY PERDANA**

Nomor Mahasiswa : **14313417**

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan **LULUS**

Pada hari Rabu, tanggal: 17 Januari 2018

Penguji/ Pembimbing Skripsi : Diana Wijayanti, Dra., M.Si.

Penguji : Suharto, SE., M.Si.



.....

.....

Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Indonesia



Dr. D. Agus Harjito, M.Si.

MOTTO

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan.Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain). Dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap.” (QS. Al-Insyirah,6-8)

"Pendidikan merupakan senjata paling ampuh yang bisa kamu gunakan untuk merubah dunia" (Nelson Mandela)

“Allah meninggikan orang-orang yang beriman diantara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat” (Depag RI, 1989 : 421)

“Aku tidak peduli akan keadaan susah dan senangku.Karena aku tidak tahu manakah diantara keduanya itu yang lebih baik bagiku”. (Umar bin Khatab)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Syukur tiada henti yang selalu penulis panjatkan atas ridho, rahmat, dan hidayah-Nya, serta kelancaran dan kemudahan yang telah diberikan Allah SWT kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan sesuai dengan waktu dan harapan yang telah terpenuhi. Skripsi yang telah ditulis ini, penulis persembahkan untuk :

1. Terima kasih kepada Allah SWT.
2. Terima kasih kepada Nabi Muhammad SAW.
3. Terima kasih kepada almarhum bapak saya yang telah memberikan motivasi yang tinggi dalam menempuh perkuliahan hingga sampai pada tahap pengerjaan skripsi ini.
4. Untuk ibu Diana Wijayanti yang telah memberikan bimbingan sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini.
5. Terimakasih kepada orang tuaku dan seluruh keluarga besar yang telah memberikan semangat, dukungan dan doanya. yang tidak henti-hentinya hingga sejauh ini.
6. Terimakasih kepada kedua adekku (Noviar Dony Setiaji dan Januar Devy Aryanti), atas support dan doa yang kau panjatkan.
7. Terima kasih kepada teman-teman yang mendukung dan memberikan semangat untuk mengerjakan skripsi ini.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan nikmat yang telah diberikan. Shalawat serta salam penulis haturkan kepada Nabi Muhammad SAW. Perkenalkan penulis menyampaikan ucapan terima kasih atas dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang ikut andil dalam proses penulisan skripsi ini sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: “Efisiensi Pengeluaran Pemerintah Pada Sektor Pendidikan Dan Kesehatan Pada Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 - 2015”, semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian semua.

Penyusunan skripsi ini adalah sebagai tugas akhir yang merupakan syarat untuk meraih gelar Sarjana Strata 1 pada Jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Indonesia. Dalam penyusunan laporan penelitian ini, penulis menyadari masih banyak terdapat kelemahan dan kekurangan, sehingga segala bentuk kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan penulis demi kesempurnaan laporan penelitian ini. Semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi diri penulis dan pihak-pihak terkait lainnya.

Dalam penulisan penelitian ini penulis tidak lupa pula mengucapkan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Allah SWT berkat rahmat dan hidayah-Nya yang telah memberikan kesehatan yang dilimpahkan-Nya kepada penulis selama menulis sehingga penelitian ini dapat diselesaikan.

2. Bunda Diana Wijayanti, Dra., M.Si. selaku dosen pembimbing dalam penulisan skripsi ini, terima kasih telah membimbing dan memberikan arahnya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat waktu. Ilmu-ilmu dan pengalaman yang Ibu berikan kepada penulis selama menempuh jenjang Strata 1 juga dijadikan penulis sebagai bekal untuk kedepannya. Terima kasih juga kepada Ibu yang dengan senang hati mendengarkan keluhan yang selama ini penulis curahkan.
3. Almarhum Bapak yang telah memberikan motivasi yang tinggi. Ibu dan kedua adekku yang telah memberikan do'a serta dukungan, sehingga penulis dapat menyelesaikan dan menyusun Tugas Akhir ini.
4. Terima kasih buat teman-teman seperjuangan Hakim, Rheza, Wahyu, Bima, Affan, Shadam dan Sondang yang telah berjuang bersama-sama dari ospek Fakultas sampai dengan dibuatnya skripsi ini.
5. Terima kasih buat teman – teman KKN Ronald, Destian, Bang Army, Eny, Nabila, Kipti dan Dita yang telah memberikan semangat, support dan do'a sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia, yang telah mengajarkan ilmu yang tidak ternilai, hingga penulis menyelesaikan studi di Fakultas Ekonomi Prodi Ilmu Ekonomi Universitas Islam Indonesia.
7. Teman-teman mahasiswa Jurusan Ilmu ekonomi angkatan 2014 yang telah banyak berbagi informasi dan selalu ada disaat menjalani susah dan senang yang telah seperti keluarga sendiri.

8. Dan akhirnya, semua pihak yang telah turut membantu dalam penyelesaian skripsi ini. Semoga segala kebaikan yang tulus dari semua pihak dapat diterima oleh Allah SWT serta mendapatkan pahala yang berlipat dari-Nya

Kiranya skripsi ini masih jauh dari sempurna. Namun kritik dan saran dari para pembaca sangat diharapkan untuk kesempurnaannya. Besar harapan penulis agar skripsi ini dapat bermanfaat dan memberikan kontribusi bagi penulis dan masyarakat seluruhnya.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN UJIAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	viii
HALAMAN ABSTRAK.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar belakang masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Manfaat Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
2.1 Penelitian Terdahulu.....	9
2.2 Landasan Teori	12
2.2.1 Otonomi Daerah dan Desentralisasi Fiskal	12
2.2.2 Pengeluaran Pemerintah.....	13
2.2.3 Pendapatan daerah.....	18

2.2.4	Pengeluaran Pemerintah di Sektor Kesehatan.....	19
2.2.5	Pengeluaran pemerintah sektor pendidikan	20
2.2.6	Konsep Pembangunan Manusia	21
2.2.7	Ruang Lingkup Pembangunan Manusia	22
2.2.8	Pengukuran Capaian Pembangunan Manusia	25
2.2.9	Pengukuran IPM dan Komponen Penyusunannya.....	25
2.2.10	Dimensi Kesehatan.....	29
2.2.11	Dimensi Pengetahuan.....	32
2.2.12	Rata – rata Lama Sekolah (RLS)	33
2.2.13	Perhitungan Indeks Pengetahuan	36
2.2.14	Perhitungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).....	38
2.2.15	Efisiensi.....	39
2.3	Kerangka Pemikiran	41
BAB III METOTOLOGI PENELITIAN		42
3.1	Jenis dan Sumber Data	42
3.2	Definisi Operasional Variabel	42
3.3	Metode Analisis Penelitian.....	44
3.4	Nilai Manajerial DEA	45
3.5	Formulasi DEA.....	45
3.6	Kelebihan dan Kelemahan DEA	47

BAB IV Analisis dan Pembahasan	50
4.1 Gambaran Umum	50
4.1.1 Belanja Daerah	50
4.1.2 Belanja Daerah Sektor Kesehatan	51
2.1.3 Belanja Daerah Sektor Pendidikan.....	52
2.1.4 Indeks Pembangunan Manusia (IPM).....	53
2.1.5 Angka Harapan Hidup (AHH)	54
2.1.6 Rata – rata Lama Sekolah	55
4.2 Analisis Data dan Pembahasan.....	56
BAB V SIMPULAN DAN IMPLIKASI	65
5.1 Simpulan.....	65
5.2 Implikasi	66
DAFTAR PUSTAKA	68
LAMPIRAN.....	69

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Realisasi Pendapatan dan Belanja Pemerintah Daerah	3
Tabel 1. 2 Persentase Realisasi Belanja Menurut Fungsinya.....	5
Tabel 2. 1 Perbandingan Metode Perhitungan IPM Lama dan Baru	27
Tabel 2. 2 Nilai Minimum dan Maksimum Untuk Perhitungan Indeks Indikator	28
Tabel 2. 3 Pedoman Konversi Tahun Lama Bersekolah Penduduk.....	35
Tabel 4. 1 Realisasi Total Belanja Menurut Kabupaten/Kota.....	51
Tabel 4. 2 Realisasi Belanja Sektor Kesehatan.....	52
Tabel 4. 3 Realisasi Belanja Sektor Pendidikan.....	53
Tabel 4. 4 Indeks Pembangunan Manusia (IPM).....	54
Tabel 4. 5 Angka Harapan Hidup (AHH).....	55
Tabel 4. 6 Rata – rata Lama Sekolah	56
Tabel 4. 7 Efisiensi Penggunaan Belanja Daerah Sektor Kesehatan dan Pendidikan.....	59
Tabel 4. 8 Penggunaan Input yang Efisien Dan Pemborosan	61
Tabel 4. 9 Multiplier, Efisiensi dan Efficient Reference Set	62
Tabel 4. 10 Penggunaan Input yang Efisien pada Tingkat Output yang.....	64

DAFTAR DIAGRAM

Diagram2. 1 Tahapan Perhitungan Indeks Pembangunan Manusia.....	29
---	----

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN I Data Input dan Output.....	71
LAMPIRAN II Penggunaan Input Efisien dan Pemborosan	72
LAMPIRAN III Penggunaan Input Efisien Dengan Perbandingan Benchmark...	74
LAMPIRAN IV Hasil Olah Data.....	76

Abstrak

Belanja daerah merupakan semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi equitas dana lancar yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah.

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat efisiensi belanja pemerintah kabupaten/kota Daerah Istimewa Yogyakarta yang terdiri dari belanja sektor kesehatan dan belanja sektor pendidikan sebagai variabel input dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), angka harapan hidup, rata – rata lama sekolah sebagai variabe output. Penelitian ini merupakan penelitian dengan menggunakan metode *Data Envelopment Analysis* (DEA). Teknik analisis data yang digunakan adalah dengan pendekan input yang digunakan berdasarkan output yang dihasilkan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat efisiensi kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2013 Kabupaten Bantul tidak efisien, tahun 2014 Kabupaten Bantul tidak efisien dan pada tahun 2015 Kabupaten Bantul kembali tidak efisien.

Kata Kunci : Efisiensi, Belanja Kesehatan, Belanja pendidikan

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang masalah

Setelah adanya otonomi daerah yang dimulai pada tahun 2001 diawali dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan UU No. 25 tahun 1999 tentang pemerintah daerah dan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah mengalami perubahan UU No. 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah dan UU No. 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah, ditujukan untuk menyukseskan desentralisasi di Indonesia. Berdasarkan UU No 32 Tahun 2004 Pasal 1 angka 5 memberikan definisi Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Menurut Khusaini (2006), “Desentralisasi merupakan bentuk pemindahan tanggung jawab, wewenang, dan sumber-sumber daya (dana, personil, dan lain-lain) dari pemerintah pusat ke tingkat pemerintah daerah”. Dengan begitu pemerintah daerah bisa mengatur daerahnya sendiri sesuai dengan kondisi yang terjadi di lapangan, sehingga akan tercipta pelaksanaan pemerintahan yang efektif dan efisien. Beda dengan ketika masih menggunakan sistem sentralistik yang mana kebijakan pada daerah masih di pegang oleh pemerintah pusat, dalam hal ini pemerintah pusat tidak

mengetahui kondisi dan permasalahan yang ada pada daerah tersebut, sehingga pembangunan menjadi tidak efektif dan tidak efisien.

Halim (2001), menjelaskan bahwa “ciri utama suatu daerah yang mampu melaksanakan otonomi dan desentralisasi, yaitu kemampuan keuangan daerah, artinya daerah harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahannya, dan mengurangi seminimal mungkin campur tangan pemerintahan pusat, agar pendapatan asli daerah dapat menjadi bagian sumber keuangan terbesar sehingga peranan pemerintah daerah menjadi lebih besar”. Dengan adanya peraturan baru tentang pemerintahan daerah diharapkan pemerintah daerah mampu mengelola keuangan daerahnya sendiri.

“Fungsi pemerintah adalah alokatif, distributif, stabilitatif dan dinamisatif pemerintah harus dapat menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat”, Dumairy (1996). Setiap pemerintahan pasti memiliki tujuan yaitu mensejahterakan masyarakat secara umum, hal itu bisa dicapai dengan memanfaatkan sumber daya yang ada pada daerah masing – masing. Untuk mengelola sumber daya yang ada maka dibutuhkan anggaran belanja daerah untuk mengeksekusi sumber daya yang bisa dimanfaatkan. Hasil dari pengelolaan sumber daya itu bisa menambah pemasukan bagi daerah sehingga bisa dimanfaatkan untuk belanja seperti dibidang kesehatan, pendidikan dan lain sebagainya. Selain itu pengeluaran pemerintah berperan

dalam penciptaan sarana dan prasarana bagi masyarakat sehingga masyarakat dapat memanfaatkan sarana dan prasarana tersebut. kesejahteraan masyarakat dapat diwujudkan dengan pemenuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan dan tersedianya barang publik. Pemenuhan kebutuhan dasar akan meningkatkan kualitas sumber daya manusia pada daerah yang bersangkutan.

Tabel 1. 1 Realisasi Pendapatan dan Belanja Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta 2015

Pemerintah Daerah	Realisasi Pendapatan (Juta Rupiah)	Realisasi Belanja (Juta Rupiah)	Ratio Pendapatan terhadap belanja	Surplus/ Defisit (%)
D.I. Yogyakarta	3,400,041.81	3,496,425.50	0.97	-2.84
Kab. Kulonprogo	1,227,474.67	1,243,069.95	0.99	-1.27
Kab. Bantul	1,951,223.24	1,933,302.50	1.01	0.92
Kab. Gunungkidul	1,599,006.00	1,586,001.08	1.01	0.81
Kab. Sleman	2,294,622.77	2,328,751.92	0.99	-1.49
Kota Yogyakarta	1,434,009.59	1,539,699.34	0.93	-7.37

Sumber : Badan Pusat Statistik Daerah Istimewa Yogyakarta

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa rasio pendapatan/penerimaan daerah terhadap belanja yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul dan Kabupaten Gunungkidul mengalami surplus anggaran. Hal ini berarti bahwa realisasi pendapatan yang diperoleh pada tahun 2015 sudah dapat mencukupi belanja daerah. Sedangkan rasio pendapatan/penerimaan daerah terhadap belanja yang dikeluarkan Pemerintah Daerah D.I.Yogyakarta, Pemerintah Daerah Kulonprogo, Pemerintah Kabupaten Sleman dan Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta mengalami defisit anggaran atau realisasi pendapatan yang diperoleh belum mencukupi belanja

daerah. Apabila dilihat dari segi pendapatan kabupaten/kota yang memperoleh pendapatan terbesar adalah Kabupaten Sleman dengan pendapatan sebesar 2.29 Triliun Rupiah. Sedangkan pendapatan terendah pada Pemerintah Daerah Kulonprogo yaitu sebesar 1.22 Triliun Rupiah.

Pengembangan sumber daya manusia dapat dilakukan dengan perbaikan kualitas modal manusia. Modal manusia bisa berupa pendidikan dan juga kesehatan, Mankiw (2008). Untuk membentuk masyarakat yang sejahtera hal dasar yang diperhatikan adalah pada pendidikan dan kesehatan. Karena dengan sumber daya manusia yang berpendidikan bisa mengikuti perkembangan jaman, bisa menggunakan metode – metode baru dalam pembangunan daerah dan kesehatan yang terjaga dengan baik akan tercipta efisiensi dalam membangun suatu daerah karena sumber daya yang sehat tidak akan menghalangi dalam bekerja dan berkarya.

Untuk membentuk modal dasar manusia pada suatu daerah tentu membutuhkan alokasi dana dari pemerintah daerah pada sektor pendidikan dan kesehatan. Berikut adalah tabel alokasi belanja menurut fungsinya di Daerah Istimewa Yogyakarta.

**Tabel 1. 2 Persentase Realisasi Belanja Menurut Fungsinya tahun 2015
dalam persen**

Fungsi Belanja	Kab Kulonprogo	Kab Bantul	Kab Gunung Kidul	Kab Sleman	Kota Yogyakarta
Pelayanan Umum	19.3	20.03	22.57	27.86	23.33
Ketertiban dan Keamanan	0.87	0.9	0.79	1.63	0.03
Ekonomi	6.56	4.91	6.84	11.46	5.64
Lingkungan Hidup	0.37	1.04	1.87	2.12	2.85
Perumahan dan Fasilitas Umum	12.91	11.5	8.74	17.67	13.85
Kesehatan	18.18	18.23	12.19	28.68	15.33
Pariwisata dan Budaya	0.38	0.71	0.83	0.77	0.88
Pendidikan	40.74	41.97	45.28	8.65	36.45
Perlindungan Sosial	0.49	0.7	0.88	1.17	1.64

Sumber : Badan Pusat Statistik Daerah Istimewa Yogyakarta

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat alokasi belanja Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2015. Belanja terbesar adalah pada belanja pada sektor pendidikan yaitu di Kabupaten Kulonprogo sebesar 40.74%, Kabupaten Bantul sebesar 41.97%, Kabupaten Gunung Kidul sebesar 45.28% dan Kota Yogyakarta 36.45% dari total realisasi belanja di Daerah Istimewa Yogyakarta. Angka tersebut merupakan tergolong besar karena hampir menyentuh 50% dari total realisasi belanja menurut fungsinya, selain itu berdasar tabel diatas Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta memang lebih konsentarsi di sektor pendidikan.

Persentase terbesar kedua dari tabel diatas adalah realisasi belanja daerah pada sektor kesehatan. Kabupaten Kulonprogo mengalokasikan belanjanya

sebesar 18.18%, Kabupaten Bantul sebesar 18.23%, Kabupaten Gunung Kidul sebesar 12.19%, Kabupaten Sleman sebesar 28.68%, dan Kota Yogyakarta sebesar 15.33% dari total realisasi belanja di Daerah Istimewa Yogyakarta. Data ini menunjukkan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta serius dalam pembangunan sarana dan prasarana pada sektor pendidikan dan kesehatan, tentunya sektor ini adalah modal dasar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta banyak orang menjuluki adalah kota pendidikan, julukan itu rasanya memang tidak berlebihan karena berdasarkan data yang dikutip di website <http://pendidikan-diy.go.id/dikti/home> Daerah Istimewa Yogyakarta terdapat 24 Universitas, 46 sekolah tinggi, 7 institut, 9 Politeknik, dan 43 akademi. Selain dari ketersediaannya perguruan tinggi julukan kota pendidikan bisa dilihat dari alokasi belanja daerah yang mana alokasi terbesar adalah pada sektor pendidikan dan yang kedua adalah sektor kesehatan.

Berdasarkan data tentang belanja daerah menurut fungsinya diatas penulis tertarik untuk mengadakan penelitian yang berjudul : “Efisiensi Pengeluaran Pemerintah pada Sektor Pendidikan dan Kesehatan Tahun 2013 - 2015 di Daerah Istimewa Yogyakarta”.

1.2 Rumusan Masalah

Penelitian ini akan meneliti bagaimana tingkat efisiensi belanja kesehatan dan belanja pendidikan (variabel input) terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Angka Harapan Hidup (AHH) dan rata – rata lama sekolah (variabel output) pada Daerah Istimewa Yogyakarta .

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis efisiensi pengeluaran pemerintah pada sektor pendidikan dan kesehatan terhadap rata – rata lama sekolah, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan angka harapan hidup di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diambil dari hasil penelitian ini adalah:

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini memberikan sumbangan terhadap ilmu pengetahuan guna mengetahui seberapa efisien dalam mengalokasikan dana terhadap tujuan dari alokasi dana tersebut dan pada akhirnya bisa menentukan kebijakan yang tepat dimasa depan.

Manfaat praktis

a. Bagi Pemerintah Daerah

Sebagai masukan terhadap Pemerintah Daerah (Pemda) untuk mengetahui seberapa efisien belanja pemerintah pada sektor pendidikan dan kesehatan terhadap sumber daya manusia.

b. Bagi Penulis

Sebagai sarana untuk menambah wawasan terkait dengan efisiensi dalam pengeluaran pemerintah daerah

c. Bagi pembaca

Memberikan tambahan referensi dan informasi bagi pembaca.

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian – penelitian seperti ini telah dilakukan sebelumnya sebab penelitian terdahulu dirasa sangat penting dalam sebuah penelitian yang akan dilakukan. Beberapa penelitian terdahulu yang mendasari penelitian ini antara lain :

Nama/Tahun	Judul Penelitian	Alat Analisis dan Variabel	Hasil Penelitian
Ritno H. Rondonuwu, Jantje J. Tinangon, dan Novi Budiarmo pada tahun 2015	Analisis Efisiensi dan Efektifitas Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Dinas Pendapatan Daerah kabupaten Minahasa	Analisis deskriptif, dengan rasio perbandingan, efisiensi dan efektivitas Menggunakan variabel anggaran pendapatan dan belanja daerah	Efisien pada tahun 2010, kurang efisien pada tahun 2013, dan tidak efisien pada tahun 2011, 2012 dan 2014.
Triyanti Lestari pada tahun 2013	Analisis Efisiensi Belanja Daerah di Jawa Timur (Studi Kasus Bidang Pendidikan dan Kesehatan Tahun 2009-2011)	Analisis DEA (Data Envelopment Analysis), menggunakan variabel input belanja pendidikan dan belanja kesehatan, sedangkan variabel outpunya jumlah sekolah, jumlah guru, dan jumlah siswa. Untuk kesehatan yaitu jumlah puskesmas, jumlah tenaga kerja di Puskesmas dan	Dari sepuluh Kab.Kota yang diamati selama 2009-2011 menghasilkan nilai efisiensi yang bervariasi pada masing-masing Kab./Kota dan secara umum masih banyak daerah yang belanjanya belum efisien. Belanja pendidikan lebih efisien daripada belanja kesehatan. Kabupaten

		jumlah imunisasi	Malang paling efisien dan Kota Surabaya paling Tidak efisien
Nur Yatiman dan Arif Pujiyono pada tahun 2013	Analisis Efisiensi Teknis Anggaran Belanja Sektor Kesehatan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008-2010	Alat Analisis DEA dengan variabel input belanja pemerintah sektor kesehatan. Variabel output intermediet yaitu rasio jumlah dokter per 100.000 penduduk, rasio jumlah tempat tidur tersedia di rumah sakit per 100.000 penduduk. Dan variabel outcome yaitu angka kematian bayi per 1000 jumlah kelahiran (AKB), angka kematian ibu maternal per 100.000 kelahiran hidup, dan angka harapan hidup saat lahir	Kabupaten/kota di Provinsi DIY mengalami inefisiensi. Pada tahun 2010 nilai efisiensi teknis biaya Kabupaten Sleman 42,14 persen, Kabupaten Bantul 39,18 persen, Kabupaten Gunung Kidul 53,57 persen, dan dua kabupaten/kota sudah mencapai nilai efisiensi teknis biaya 100 persen yaitu Kabupaten Kulon Progo dan Kota Yogyakarta.
Eka Dian Puspitasari dan Amin Pujiat pada tahun 2017	Analisis Efisiensi Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan di Provinsi Jawa Tengah	Alat analisis DEA dengan variabel input pengeluaran pemerintah sektor kesehatan. Variabel output intermediate rasio jumlah puskesmas per 100.000 penduduk, rasio jumlah tenaga bidan per 100.000 penduduk, dan rasio jumlah tempat tidur yang	Perolehan tingkat efisiensi teknis baik efisiensi teknis biaya maupun efisiensi teknis sistem di Provinsi Jawa Tengah masih mengalami inefisiensi dalam penggunaan belanja sektor kesehatannya. Capaian tingkat efisiensi teknis di

		tersedia di rumah sakit per 100.000 penduduk. Variabel output Angka Kematian Bayi (AKB) yang di proksi Angka Bayi Lahir Hidup (ABH), Angka Kematian Ibu (AKI) yang di proksi Angka Ibu Melahirkan Selamat (AIMS), dan Angka Harapan Hidup (AHH)	Provinsi Jawa Tengah masih dalam kriteria capaian efisiensi tinggi antara 81-99 persen. Maka diperlukan target perbaikan target perbaikan untuk variabel input dan output agar mencapai efisien dalam penggunaan belanja kesehatannya
Neneng Erlina Indriati pada tahun 2014	Analisis Efisiensi Belanja Daerah di Kabupaten Sumbawa (Studi Kasus Bidang Pendidikan dan Kesehatan)	Metode DEA menggunakan variabel input nominal jumlah belanja pendidikan dan nominal jumlah belanja kesehatan. Variabel output intermediate rasio guru per murid dan rasio kelas per murid sedangkan untuk kesehatan indikator fasilitas dan layanan yang tersedia adalah rasio jumlah dokter per 1000 penduduk, rasio tenaga kesehatan per 1000 orang dan imunisasi campak	Secara rata – rata terjadi inefisiensi teknis biaya bidang pendidikan di kecamatan Batu Lanteh, daerah yang sudah mencapai efisien teknis sistem Kecamatan Sumbawa, RHEE dan Maronge. Untuk efisiensi dalam teknis biaya bidang kesehatan yaitu Kecamatan Lantung, dalam teknis sistem adalah Kecamatan Maronge, Sumbawa, Utan dan Alas Barat.
Riswan Yudhi Fahrianta dan Viani Carolina pada tahun 2012	Analisis Efisiensi Anggaran Belanja Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas	Menggunakan metode perbandingan antara data realisasi anggaran	Secara keseluruhan sudah efisien dalam menggunakan dan mengelola

		dengan anggaran belanja dikalikan 100% untuk mendapatkan efisiensi anggaran belanja. Menggunakan data kuantitatif berupa anggaran keuangan dan realisasi anggaran. Data kuantitatif dari hasil pengamatan dan wawancara dengan pihak yang terkait.	anggaran belanja dan belanja tidak langsung. Ada dua program yang tingkat efisiensinya dibawah 50% pada tahun 2010 yaitu peningkatan kapaistas sumber daya aparatur dan program wajib belajar sembilan tahun.
--	--	--	---

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Otonomi Daerah dan Desentralisasi Fiskal

Otonomi daerah menurut UU No.32 Tahun 2004, diartikan sebagai hak wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang – undangan. “Otonomi daerah berimplikasi khusus bagi pemerintah daerah yaitu semakin meingkatnya biaya ekonomi (*hight cost ekonomi*), dan yang kedua adalah efisiensi dan efektifitas. Oleh karena itu desentralisasi membutuhkan dana yang memadai bagi pelaksanaan pembangunan di daerah”, (Handayani 2009).

Menurut Khusaini (2006), “desentralisasi merupakan bentuk pemindahan tanggung jawab , wewenang, dan sumber – sumber daya (dana, prsonil, dan lain – lain) dari pemerintah pusat ke pemerintah

daerah. Desentralisasi dapat pula diartikan sebagai pelimpahan kewenangan di bidang penerimaan anggaran atau keuangan, baik secara administratif maupun pemanfaatannya diatur atau dilakukan oleh pemerintah pusat”. Oleh karena itu, salah satu makna desentralisasi fiskal dalam bentuk pemberian otonomi di bidang keuangan (sebagian sumber penerimaan) kepada daerah-daerah merupakan suatu proses pengintensifikasian peranan dan sekaligus pemberdayaan daerah dalam pembangunan. “Desentralisasi fiskal memerlukan adanya pergeseran beberapa tanggung jawab terhadap pendapatan (*revenue*) dan atau pembelanjaan (*expenditure*) ke tingkat pemerintahan yang lebih rendah”, (Handayani 2009). Faktor yang sangat penting dalam menentukan desentralisasi fiskal adalah sejauh mana pemerintah daerah diberi wewenang (otonomi) untuk menentukan alokasi atas pengeluarannya sendiri.

2.2.2 Pengeluaran Pemerintah

Adolph Wagner melakukan pengamatan terhadap negara – negara Eropa, Amerika Serikat dan Jepang pada abad ke-19 menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah dalam perekonomian cenderung semakin meningkat dengan pengukuran dari perbandingan pengeluaran pemerintah terhadap produk nasional. Kemudian oleh Richard A. Musgrave dinamakan “Hukum Pengeluaran Pemerintah yang Selalu Meningkat” (*law of growing public expenditures*). Wagner sendiri

menamakannya “hukum akitivitas pemerintah yang selalu meningkat” (law o ever increasing state activity).

Menurut Wagner ada lima hal yang menyebabkan pengeluaran pemerintah selalu meningkat, yaitu : (Dumairy,1999)

1. Tuntutan peningkatan perlindungan keamanan dan pertahanan
2. Kenaikan tingkat pendidikan masyarakat
3. Urbanisasi yang mengiringi pertumbuhan ekonomi
4. Perkembangan demokrasi
5. Ketidakefisienan birokrasi yang mengiringi perkembangan pemerintah

Menurut Sukirno (2004), penentu penentu pengeluaran pemerintah diantaranya :

1. Proyeksi jumlah pajak yang diterima

Dalam menyusun anggaran pemerintah harus terlebih dahulu memproyeksikan seberapa besar jumlah pajak yang akan diterima. Semakin banyak jumlah pajak yang diterima maka semakin banyak pula pengeluaran pemerintah.

2. Tujuan – tujuan ekonomi yang dicapai

Dalam kegiatan pemerintahan memiliki tujuan yang penting yaitu mengatasi pengangguran, menghindari inflasi dan mempercepat pembangunan ekonomi. Untuk mengatasi hal tersebut pemerintah perlu membiayai pembangunan infrastruktur, pengembangan pendidikan dan kesehatan,

3. Pertimbangan politik dan keamanan

Kekacauan politik, perselisihan antar berbagai golongan masyarakat sering berlaku diberbagai negara. Hal tersebut akan menyebabkan kenaikan pengeluaran pemerintah. Terutama apabila operasi militer, ancaman dari negara luar akan mengakibatkan ancaman ketidakstabilan sehingga pemerintah akan melakukan membelanjakan uang yang lebih besar untuk angkatan bersenjata.

Peacock dan Wiseman (Mangkoesoebroto, 1993), berpendapat lain dalam menerangkan perilaku perkembangan pengeluaran pemerintah. Untuk membiayai anggarannya pemerintah cenderung menaikkan pajak. Disisi lain masyarakat enggan untuk membayar pajak, terlebih lagi pajak terus dinaikkan. Mempertimbangkan teori pemungutan suara dimana masyarakat memiliki batas toleransi pembayaran pajak. Dalam perkembangan ekonomi yang meningkat menyebabkan pemungutan pajak juga semakin meningkat. Dalam kondisi normal meningkatnya GNP akan meningkatkan penerimaan pemerintah semakin besar begitu juga dengan pengeluaran pemerintah juga akan semakin besar.

Pengeluaran pemerintah dialokasikan sebagian untuk membiayai administrasi pemerintah dan sebagian lainnya untk membiayai kegiatan – kegiatan pembangunan. Beberapa bidang penting yang dibiayai pemerintah adalah untuk membayar gaji pegawai pemerintah, membiayai sistem pendidikan dan kesehatan rakyat, membiayai perbelanjaan angkatan bersenjata, dan membiayai berbagai jenis

infrastruktur yang penting dalam pembangunan. Pembelanjaan – pembelanjaan tersebut akan meningkatkan pengeluaran agregat dan menaikkan kegiatan ekonomi negara. (Sukirno, 2004)

Di Indonesia, pengeluaran pemerintah dapat dibedakan menjadi dua klasifikasi, yaitu : (Dumairy, 2002)

1. Pengeluaran rutin

Pengeluaran rutin merupakan pengeluaran untuk pemeliharaan atau penyelenggaraan roda pemerintahan sehari – hari, meliputi belanja pegawai, belanja barang, berbagai macam subsidi (subsidi daerah dan subsidi harga barang), angsuran dan bunga utang pemerintah, serta jumlah pengeluaran lain. Anggaran belanja rutin sangat penting untuk menunjang kelancaran dalam menjalankan pemerintahan serta upaya peningkatan efisiensi dan produktifitas yang pada akhirnya akan menunjang tercapainya sasaran dan tujuan setiap pembangunan. Untuk menambah tabungan pemerintah perlu dilakukan penghematan dan efisiensi pengeluaran rutin untuk pembiayaan pembangunan nasional. Penghematan tersebut antara lain melakukan efisiensi dan keefektifan dana alokasi pengeluaran rutin, pengendalian dan koordinasi pelaksanaan pembelian barang dan jasa sesuai kebutuhan, dan pengurangan berbagai macam subsidi secara bertahap.

2. Pengeluaran pembangunan

Pengeluaran pembangunan merupakan pengeluaran yang bersifat menambah modal masyarakat dalam bentuk pembangunan prasarana fisik maupun non fisik. Selain itu pengeluaran pembangunan merupakan pengeluaran yang ditujukan untuk membiayai program – program pembangunan sehingga anggarannya selalu disesuaikan dengan dana yang berhasil dimobilisasi. Dana ini kemudian dialokasikan pada berbagai bidang sesuai dengan prioritas yang telah direncanakan.

Menurut Dumairy (1999), pemerintah memiliki 4 peran yaitu :

- a) Peran alokatif. Yaitu peranan pemerintah dalam mengalokasi sumber daya ekonomi yang ada supaya pemanfaatannya bisa optimal dan mendukung efisiensi produksi.
- b) Peran distributif, yaitu peranan pemerintah dalam mendistribusikan sumber daya, kesempatan dan hasil – hasil ekonomi secara adil.
- c) Peran stabilitatif, yaitu peranan pemerintah dalam menjaga stabilitas perekonomian dan memulihkannya apabila berada dalam keadaan tidak seimbang.
- d) Peran dinamisatif, yaitu peranan pemerintah dalam menggerakkan pembangunan ekonomi agar lebih cepat tumbuh, berkembang dan maju.

2.2.3 Pendapatan daerah

Pendapatan daerah yang diperoleh dari pendapatan asli daerah maupun dana perimbangan tentunya digunakan untuk membiayai belanja daerah. Menurut UU No. 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah, belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Berdasarkan struktur anggaran daerah elemen – elemen yang termasuk dalam belanja daerah terdiri dari :

1. Belanja aparatur daerah
2. Belanja pelayanan publik
3. Belanja bagi hasil dan bantuan keuangan
4. Belanja tidak tersangka.

Belanja daerah dipergunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib dan pilihan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang – undangan. Belanja daerah berdasarkan pada Permendagri No.13 tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dikelompokkan kedalam belanja langsung dan belanja tidak langsung.

1. Belanja langsung

Kelompok belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan yaitu belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal.

2. Belanja tidak langsung

Belanja yang mana secara tidak langsung tidak terkait dengan program dan kegiatan, seperti belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga.

Menurut Priyo (2009), “ Belanja daerah pada dasarnya fungsi dari penerimaan daerah. Besaran belanja sangat bergantung pada sumber – sumber pembiayaan daerah, baik yang berasal dari penerimaan sendiri maupun dari transfer pemerintah pusat. Sehingga dalam pengukurannya jika terdapat hubungan negatif antara variabel – variabel pendapatan dengan variabel belanja, maka terdapat ilusi fiskal”.

2.2.4 Pengeluaran Pemerintah di Sektor Kesehatan

Sektor kesehatan memiliki definisi yang lebih luas di negara sedang berkembang dari pada di negara maju. Perbedaan ini sudah pasti akan mempengaruhi proses pengambilan keputusan di sektor kesehatan, terutama dalam hal pembiayaannya.

Mills dan Gilson (1990) dalam literturnya mencoba membatasi ruang lingkup sektor kesehatan ke dalam lima aspek, yaitu :

- a. Pelayanan kesehatan, jasa – jasa sanitasi lingkungan (misalnya air, sanitasi, pengawasan polusi lingkungan, keselamatan kerja, dan lain – lain)
- b. Rumah sakit, institusi kesejahteraan sosial.
- c. Pendidikan, pelatihan – pelatihan, penelitian medis murni.

- d. Pekerjaan medis sosial, kerja sosial.
- e. Praktisi medis yang mendapat pendidikan formal, penyedia layanan kesehatan tradisional.

Dalam rangka tujuan dan sarana pembangunan kesehatan maka diperlukan dana, baik dari pemerintah maupun masyarakat. Wasisto dan Ascobat (1986) menyebutkan bahwa “Sumber pembiayaan sektor kesehatan bersumber dari pemerintah dan swasta. Sumber pemerintah dapat berasal dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan bantuan dari luar negeri. Sedangkan sumber pembiayaan swasta bersumber dari pengeluaran rumah tangga atau perorangan (out of pocket), perusahaan swasta/perusahaan milik pemerintah untuk membiayai karyawannya, badan penyelenggara jaminan pembiayaan kesehatan termasuk asuransi kesehatan untuk membiayai pesertanya, dan lembaga non pemerintah yang umumnya bergerak ke sektor kesehatan”.

2.2.5 Pengeluaran pemerintah sektor pendidikan

Pada UU No. 20 Tahun 2013 menyebutkan bahwa “Dana alokasi pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN) pada sektor pendidikan, sedangkan untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) minimal 20%”. Negara – negara yang maju dapat dilihat dari tingginya tingkat pendidikan masyarakatnya. Hal tersebut bisa tercapai karena pelayanan pendidikan pada negara maju

memadai dan menunjang semua kebutuhan pada kependidikan.” Peran dominan pemerintah dalam pasar pendidikan tidak hanya mencerminkan masalah kepentingan pemerintah tetapi juga aspek ekonomi khusus yang dimiliki oleh sektor pendidikan, karena karakteristik yang ada pada sektor pendidikan” yaitu : (Achsana dalam Rica Amanda. 2010)

- a. Pengeluaran pendidikan sebagai investasi
- b. Eksternalitas
- c. Pengeluaran bidang pendidikan dan implikasinya terhadap kebijakan publik
- d. Rate of return pendidikan

Menurut E.Setiawan (2006) ”Implikasi dari pembangunan pada sektor pendidikan adalah kehidupan manusia akan semakin berkualitas”. Dalam kaitannya dengan perekonomian semakin tinggi tingkat kualitas hidup semakin tinggi pula tingkat pertumbuhan dan kesejahteraan bangsa. Semakin tinggi kualitas hidup/ investasi sumber daya manusia yang berkualitas akan berimplikasi juga terhadap tingkat pertumbuhan ekonomi nasional.

2.2.6 Konsep Pembangunan Manusia

Menurut Badan Pusat Statistik (2016), “Pembangunan manusia bukanlah pembangunan yang berdimensi tunggal, karena pada hakikatnya manusia adalah entitas yang kompleks”. United Nations Development Programme (UNDP) merumuskan konsep pembangunan manusia (human development) sebagai perluasan pilihan bagi penduduk

yang dapat dilihat sebagai proses upaya ke arah "perluasan pilihan" atau sekaligus sebagai taraf yang dicapai dari upaya tersebut. Konsep pembangunan manusia ini mengkaji manusia dari dua sisi yang berbeda. Sisi yang pertama adalah meningkatkan kapabilitas fisik atau pembentukan kemampuan berfungsi manusia melalui jalur perbaikan taraf kesehatan, pengetahuan/pendidikan, dan keterampilan. Sementara, sisi yang kedua adalah bagaimana memanfaatkan kapabilitas atau kemampuan yang dimiliki untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang sifatnya produktif

2.2.7 Ruang Lingkup Pembangunan Manusia

Menurut Badan Pusat Statistik (2016), "Konsep pembangunan manusia memiliki dimensi yang lebih luas dibandingkan dengan konsep pembangunan ekonomi yang menekankan pada aspek pertumbuhan (economic growth), kebutuhan dasar (basic needs), kesejahteraan masyarakat (social welfare), atau pengembangan sumber daya manusia (human resource development)". UNDP (1995) mengajukan beberapa premis penting terkait dengan pembangunan manusia. Pertama, pembangunan harus mengutamakan penduduk sebagai fokus pusat perhatian. Dalam hal ini, unsur manusia ditempatkan sebagai subyek sekaligus obyek utama dalam proses pembangunan. Arti dari subyek manusia adalah pelaku utama yang menentukan arah dan keberlangsungan proses pembangunan. Sementara, arti dari obyek

manusia adalah pihak yang akan paling banyak merasakan dan menikmati hasil dari proses pembangunan yang dilaksanakan.

Kedua, tujuan dari pembangunan yaitu untuk memperbesar dan memperluas pilihan bagi penduduk dan bukan hanya sekedar untuk meningkatkan level pendapatannya. Konsep pembangunan manusia yang terpusat pada aspek penduduk secara keseluruhan, bukan hanya pada aspek ekonomi saja. Ketiga, fokus pembangunan manusia bukan hanya pada upaya peningkatan kemampuan atau kapabilitas manusia, tetapi juga fokus pada upaya untuk memanfaatkan kemampuan yang dimiliki manusia secara optimal. Keempat, pembangunan manusia menjadi dasar dalam penentuan tujuan pembangunan dan dalam menganalisis pilihan-pilihan untuk mencapainya. Kelima, pembangunan manusia harus didukung oleh empat pilar pokok, yaitu: produktifitas (*productivity*), pemerataan (*equity*), kesinambungan (*sustainability*), dan pemberdayaan (*empowerment*).

Konsep pembangunan manusia yang diadopsi oleh UNDP pada hakikatnya merupakan pengembangan dari pemikiran yang diajukan oleh dua ekonom terkemuka, Mahbub ul Haq dan Amartya Sen. Menurut pandangan mereka, “Perluasan pilihan hanya mungkin direalisasikan jika penduduk minimal memiliki tiga aspek: peluang berumur panjang dan sehat, pengetahuan dan keterampilan yang memadai, serta peluang untuk merealisasikan pengetahuan yang dimiliki dalam kegiatan yang produktif yang mampu meningkatkan daya belinya”

Pendekatan ini menyempurnakan pendekatan yang telah ada sebelumnya yang lebih menekankan pada aspek Produk Domestik Bruto (PDB) perkapita sebagai indikator tunggal untuk mengukur kemajuan pembangunan. Mahbub ul Haq menyatakan bahwa “PDB perkapita yang tinggi belum tentu menunjukkan kesejahteraan masyarakat yang tinggi. Fenomena kesenjangan/ketimpangan pendapatan, kemiskinan, serta ketidakadilan yang berjalan berdampingan dan beriringan dengan pendapatan perkapita yang tinggi, membuat pola pertumbuhan dan prioritas pembangunan pemerintah yang selama ini berlangsung menjadi patut untuk dipertanyakan. Indikator PDB perkapita yang berdiri sendiri tidak bisa dijadikan sebagai dasar dalam penentuan tingkat kesejahteraan masyarakat tanpa disertai dengan analisis yang mendalam mengenai distribusi/tingkat sebaran pendapatan maupun sumber-sumber utama yang menentukan tingkat PDB perkapita tersebut”.

Konsep dan lingkup pembangunan manusia yang telah diuraikan di atas memiliki persinggungan yang cukup besar dengan tujuan pembangunan milenium atau Millenium Development Goals (MDG's) yang dideklarasikan pada akhir tahun 2000 dan dilanjutkan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDG's). Keduanya menempatkan manusia sebagai titik pusat dalam keseluruhan proses pembangunan. Hampir semua dimensi pembangunan manusia yang tercakup baik dimensi kesehatan, dimensi pendidikan, dan dimensi kehidupan yang layak tertuang ke dalam butir-butir kesepakatan

tujuan pembangunan yang yang ditandatangani dalam deklarasi MDG's maupun SDG's.

2.2.8 Pengukuran Capaian Pembangunan Manusia

Menurut Badan Pusat Statistik (2016), "IPM menjadi indikator komposit yang cukup representatif untuk menggambarkan capaian kualitas pembangunan manusia antar wilayah di Indonesia". Dalam perkembangannya IPM telah beberapa kali mengalami penyempurnaan terkait dengan metode penghitungan maupun indikator penyusunnya.

Secara umum, IPM disusun dari empat indikator yang menggambarkan tiga dimensi pembangunan manusia yang paling mendasar. Dimensi peluang hidup diukur dengan indikator angka harapan hidup penduduk pada saat lahir (life expectancy at age 0 atau e_0). Dimensi pengetahuan diukur dengan dua indikator, yakni angka harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah penduduk berusia kerja (mean years of schooling). Standar kehidupan yang layak diukur dengan indikator pendapatan perkapita riil yang telah disesuaikan dengan paritas daya beli (Purchasing Power Parity/PPP) di wilayah yang bersangkutan

2.2.9 Pengukuran Indeks Pembangunan Manusia dan Komponen Penyusunannya

Menurut Badan Pusat Statistik (2016), "Tahap pertama dalam penghitungan IPM adalah menentukan indikator dari masing-masing dimensi pembangunan manusia". Dalam penghitungan IPM menggunakan metode baru yang mulai digunakan pada tahun 2010,

dimensi umur panjang dan sehat diukur menggunakan indikator angka harapan hidup penduduk pada saat lahir (AHH) dalam satuan tahun. Dimensi pengetahuan diukur menggunakan dua indikator yakni angka harapan lama sekolah (HLS) dalam satuan tahun dan rata-rata lama sekolah (RLS) penduduk berusia kerja (25 tahun ke atas) dalam satuan tahun. Indikator RLS dalam metode baru menggunakan referensi penduduk usia 25 tahun ke atas dengan pertimbangan telah menyelesaikan masa belajar. Referensi penduduk usia lebih dari 25 tahun lebih mampu menggambarkan kondisi yang sebenarnya dibandingkan dengan kelompok usia lebih dari 15 tahun. Dimensi kehidupan yang layak diukur dengan pengeluaran perkapita yang disesuaikan dengan daya beli (PPP) dalam satuan rupiah. Selain penyempurnaan indikator, metode agregasi indikator juga disempurnakan dari rata-rata hitung (aritmatika) menjadi rata-rata ukur (geometrika).

Perbedaan metode penghitungan IPM yang digunakan di Indonesia dan UNDP beserta penyempurnaannya disajikan dalam tabel dibawah ini:

Tabel 2. 1 Perbandingan Metode Perhitungan IPM Lama dan Baru yang Digunakan Oleh BPS dan UNDP

Dimensi	METODE LAMA		METODE BARU	
	UNDP	BPS	UNDP	BPS
Kesehatan	Angka Harapan Hidup saat Lahir (AHH)	Angka Harapan Hidup saat Lahir (AHH)	Angka Harapan Hidup saat Lahir (AHH)	Angka Harapan Hidup saat Lahir (AHH)
Pengetahuan	Angka Meleke Huruf (AMH)	Angka Melek Huruf (AMH)	Rata – rata Lama Sekolah (RLS)	Harapan Lama Sekolah (HLS)
	Kombinasi Angka Partisipasi Kasar (APK)	Rata – rata Lama Sekolah (RLS)	Rata – rata Lama Sekolah (RLS)	Rata – rata Lama Sekolah (RLS)
Standar Hiup Layak	PDB per kapita	Pengeluaran per kapita	PNB per kapita	Pengeluaran per kapita
Agregasi	Rata – rata Hitung		Rata – rata Ukur	
	$IPM = \frac{1}{3} (I_{kesehatan} + I_{pengetahuan} + I_{pendapatan})$		$IPM = \sqrt[3]{I_{kesehatan} \times I_{pengetahuan} \times I_{pendapatan}}$	

Sumber = Sosialisasi IPM Metode Baru, BPS

Ada beberapa perbedaan antara indikator yang digunakan oleh UNDP dan yang diimplementasikan dalam penghitungan IPM di Indonesia oleh BPS. Letak perbedaan tersebut adalah indikator pengetahuan dan indikator kehidupan yang layak. UNDP menggunakan angka melek huruf dan angka partisipasi sekolah kasar (Gross Enrollment Ratio-GER) sebagai indikator pendidikan, sementara BPS menggunakan angka harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah penduduk berusia 25 tahun ke atas. Kehidupan yang layak oleh UNDP diproksi menggunakan indikator PDRB riil perkapita yang disesuaikan dengan

daya beli wilayah setempat (Purchasing Power Parity-PPP), sementara BPS menggunakan pendekatan indikator pengeluaran perkapita riil yang disesuaikan.

Tahap yang kedua dalam penghitungan IPM adalah menentukan nilai indeks indikator dari ketiga dimensi pembangunan manusia. Formula penghitungan indeks setiap indikator dilakukan menggunakan rumus umum indeks tunggal berikut:

$$\text{Indeks } X_{i,j} = \frac{(X_{i,j} - X_{i \min})}{(X_{i \max} - X_{i \min})}$$

$X_{(i,j)}$ = Komponen IPM ke-i dari daerah ke-j

$X_{(i \min)}$ = Nilai minimum dari komponen IPM ke-i

$X_{(i \max)}$ = Nilai maksimum dari Komponen IPM ke-i

Batasan nilai minimum dan maksimum yang mengacu kepada UNDP, kecuali indikator daya beli. Nilai minimum dan maksimum secara ringkas disajikan dalam tabel berikut :

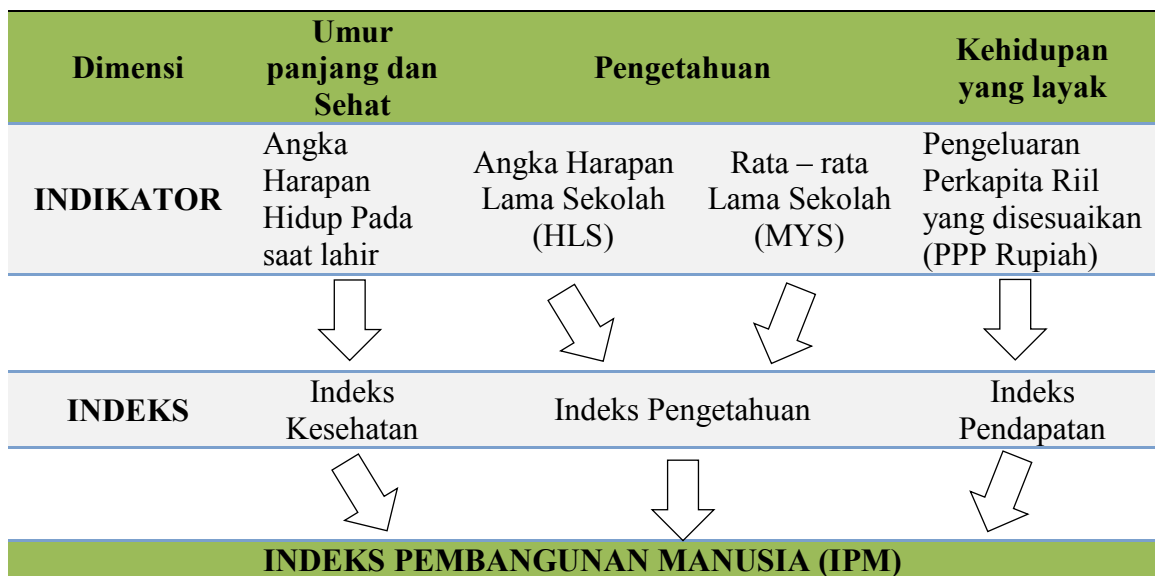
**Tabel 2. 2 Nilai Minimum dan Maksimum
Untuk Perhitungan Indeks Indikator**

Indikator	Satuan	Minimum		Maksimum	
		UNDP	BPS	UNDP	BPS
Angka Harapan Hidup saat lahir (AHH)	Tahun	20	20	85	85
Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	0	0	18	18
Rata – rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	0	0	15	15
Pengeluaran per Kapita Disesuaikan		100 (PPP US\$)	1,007,436* (Rp)	107,721 (PPP US\$)	26,572,352** (Rp)

Sumber : Sosialisasi IPM Metode Baru, BPS

Tahap yang selanjutnya adalah menghitung nilai indeks setiap dimensi dan kemudian menghitung nilai IPM berdasarkan nilai indeks ketiga dimensi menggunakan metode rata-rata ukur (geometrik). Tahapan penghitungan IPM secara ringkas terangkum dalam diagram berikut ini :

Diagram 2.1 Tahapan Perhitungan Indeks Pembangunan Manusia



Sumber : BPS, 2011

2.2.10 Dimensi Kesehatan

Menurut Badan Pusat Statistik (2016), kesehatan menjadi unsur terpenting dari modal manusia disamping pendidikan. Dimensi kesehatan yang direpresentasikan oleh umur yang panjang dan sehat menjadi fokus utama dalam pembangunan manusia, karena umur yang panjang dan sehat sangat menentukan tingkat produktivitas yang dihasilkan oleh suatu wilayah atau negara. Artinya, dimensi kesehatan juga memiliki peranan sentral dalam mewujudkan kesejahteraan manusia. Dari sekian banyak indikator di bidang kesehatan, angka harapan hidup penduduk pada saat

lahir dinilai mampu menggambarkan kualitas kesehatan penduduk secara umum sehingga dipilih menjadi indikator kesehatan. Semakin tinggi usia harapan hidup di suatu daerah menggambarkan derajat kesehatan penduduk yang semakin meningkat. Derajat kesehatan yang semakin meningkat akan mendorong peningkatan produktivitas kerja, sehingga tingkat pendapatan yang diterima juga akan meningkat. Peningkatan pendapatan menjadi salah satu prasyarat bagi peningkatan derajat kesejahteraan masyarakat.

Angka harapan hidup penduduk pada saat lahir biasa dilambangkan dengan e_0 . Angka ini menyatakan perkiraan rata-rata usia atau tahun yang akan dijalani oleh sekelompok orang yang dilahirkan pada waktu tertentu (kohor yang sama) hingga akhir masa hidupnya, dengan asumsi pola mortalitasnya bersifat tetap. Penghitungan e_0 dilakukan menggunakan pendekatan life table, namun metode ini belum dapat diimplementasikan di Indonesia. Sistem registrasi penduduk belum dikelola dengan baik dan berkelanjutan, sehingga data pokok untuk penghitungan indikator yang berupa data kematian penduduk menurut kelompok umur juga belum tersedia.

Cara alternatif yang digunakan untuk mengestimasi angka harapan hidup dilakukan dengan metode tak langsung menggunakan bantuan perangkat lunak Micro Program for demographic Analysis (MCPDA) atau Mortpak for Windows. Variabel yang digunakan adalah rata-rata jumlah anak yang dilahirkan hidup (live birth) dan rata-rata jumlah anak

yang masih hidup (still living) dari wanita pernah kawin berusia 15-49 tahun yang dikelompokkan menurut kelompok umur lima tahunan. Sumber data utama yang digunakan dalam penghitungan berasal dari hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang dilaksanakan secara berkala. Angka eo yang dihasilkan dari metode penghitungan ini merujuk pada keadaan 3-4 tahun dari tahun survei. Berdasarkan angka harapan hidup yang dihasilkan, besarnya nilai indeks kesehatan dari wilayah yang bersangkutan juga dapat dihitung dengan formula:

$$\text{Indeks Kesehatan} = \frac{(AHH - AHH_{\min})}{(AHH_{\max} - AHH_{\min})}$$

AHH = Angka harapan hidup

AHH_{min} = Nilai minimum dari AHH, UNDP menetapkan sebesar 20 tahun

AHH_{maks} = Nilai maksimum dari AHH, UNDP menetapkan sebesar 85 tahun

Nilai indeks kesehatan berada diantara angka nol (0) dan satu (1). Semakin mendekati nol menunjukkan keadaan yang semakin memburuk dan semakin mendekati satu menunjukkan keadaan yang semakin membaik. Untuk mempermudah penafsiran, nilai Indeks tersebut dapat dinyatakan dalam satuan ratusan atau dikalikan 100. Nilai indeks tidak memiliki makna khusus ketika berdiri sendiri, tetapi ketika dibandingkan dengan angka yang sama dari daerah lainnya maka dapat dilihat

gambaran perbandingan pencapaian pembangunan di bidang kesehatan antarwilayah.

2.2.11 Dimensi Pengetahuan

Pengetahuan menjadi salah satu unsur terpenting dari modal manusia yang sangat menentukan tingkat produktivitas dan daya saing suatu bangsa dalam kehidupan global. Tenaga kerja yang terdidik dan terampil sebagai output dari proses pendidikan formal dan non formal adalah komponen yang mempengaruhi kelangsungan proses produksi barang dan jasa dan secara tidak langsung hal ini akan memberi pengaruh pada tingkat kesejahteraan penduduk secara umum. Banyak fakta yang menunjukkan semakin baik kualitas pengetahuan penduduk di suatu wilayah maka akan diikuti oleh perbaikan kesejahteraan, sehingga pendidikan seringkali dianggap sebagai variabel antara bagi penurunan tingkat kemiskinan di suatu wilayah.

“Dari sekian banyak indikator pendidikan yang tersedia, rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah dianggap cukup representatif untuk menggambarkan capaian pembangunan pendidikan oleh penduduk di suatu wilayah. Artinya, kedua indikator tersebut mampu menggambarkan stok pencapaian pengetahuan yang menjadi unsur modal manusia di suatu wilayah”, Badan Pusat Statistik (2016).

2.2.12 Rata – rata Lama Sekolah (RLS)

Menurut Badan Pusat Statistik (2016), “konsep lama tahun bersekolah atau years of schooling didefinisikan sebagai lamanya seseorang mengikuti pendidikan formal yang dimulai dari masuk sekolah dasar (SD) sampai dengan kelas terakhir yang diselesaikan pada tingkat atau jenjang pendidikan terakhir yang ditempuh. Lamanya bersekolah merupakan ukuran akumulasi investasi pendidikan yang dicapai oleh setiap individu penduduk, sehingga ukuran ini sekaligus menggambarkan stok pencapaian pendidikan manusia”.

Indikator yang dapat dihitung berdasarkan lama bersekolah setiap individu penduduk adalah rata-rata lama sekolah (Mean Years of Schooling). Sebagai indikator tunggal, RLS mampu menjadi ukuran akumulasi modal manusia suatu wilayah. Ukuran ini belum mempertimbangkan kasus-kasus siswa tidak naik kelas, siswa putus sekolah yang kemudian melanjutkan kembali, dan siswa yang masuk sekolah dasar di usia yang terlalu muda atau sebaliknya terlambat masuk sekolah. Akibatnya, nilai dari jumlah tahun bersekolah bisa menjadi terlalu tinggi (overestimate) atau bahkan terlalu rendah (underestimate).

Pada awalnya, UNDP menggunakan rata-rata lama sekolah yang dikombinasikan dengan angka melek huruf sebagai indikator pendidikan dalam IPM. Referensi populasi yang digunakan UNDP dalam penghitungan rata-rata lama sekolah dibatasi pada penduduk yang berusia 25 tahun ke atas. Batasan itu diperlukan supaya angka yang

dihasilkan lebih mencerminkan kondisi yang sebenarnya, karena sebagian dari penduduk yang berusia kurang dari 25 tahun masih dalam proses sekolah atau belum menuntaskan sekolahnya. Akibat keterbatasan data, dalam penghitungan IPM sejak tahun 1995 indikator rata-rata lama sekolah penduduk digantikan dengan GER (Gross Enrolment Ratio). Pada penghitungan IPM tahun 2010, indikator GER kembali digantikan dengan indikator RLS.

Di Indonesia, data Susenas sudah tersedia dalam series tahunan dan cukup valid untuk menghitung rata-rata lama sekolah penduduk, sehingga dalam penghitungan IPM di Indonesia indikator RLS tetap digunakan. Referensi penduduk yang digunakan disempurnakan dari penduduk berusia 15 tahun ke atas menjadi 25 tahun ke atas. Konsekuensinya adalah angka yang dihasilkan akan cenderung lebih rendah, karena penduduk pada kelompok umur 15-25 tahun cenderung memiliki lama bersekolah yang lebih tinggi.

Metode penghitungan lama bersekolah individu dapat dikonversikan langsung dari jenjang pendidikan dan kelas tertinggi yang pernah diduduki seseorang. Sumber data yang digunakan adalah data Susenas, terutama pada pertanyaan mengenai jenjang atau jenis pendidikan tertinggi yang pernah atau sedang diduduki oleh penduduk berusia 25 tahun ke atas. Secara rinci, pedoman konversi tahun lama bersekolah penduduk berdasarkan jenjang pendidikan dan kelas tertinggi yang sedang/pernah diduduki mengacu pada metode yang digunakan

oleh Barro dan Lee (1993). Populasi penduduk dibagi menjadi tujuh kelompok berdasarkan jenjang pendidikan yang terdiri dari tidak/belum pernah bersekolah, Sekolah Dasar, Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), Diploma, DIV/S1 dan pasca sarjana (S2/S3).

Proses konversi akan menghasilkan variabel kuantitatif lama tahun bersekolah yang bersifat discrete dengan nilai antara 0 sampai 18 tahun (Tabel 2.3). Sebagai ilustrasi, seorang penduduk yang telah menempuh pendidikan tertinggi pada jenjang SLTP kelas 2 maka ia memiliki jumlah tahun bersekolah sama dengan 7 tahun dengan rincian 6 tahun bersekolah di jenjang SD ditambah dengan 1 tahun di jenjang SMP.

Tabel 2. 3 Pedoman Konversi Tahun Lama Bersekolah Penduduk Berdasarkan Jenjang Pendidikan dan Kelas Tertinggi yang Ditamatkan

Jenjang	Kelas/tahun	Jumlah tahun bersekolah (kumulatif)
Tidak/Belum Pernah Sekolah	0	0
Sekolah Dasar (SD) sederajat	1	1
	2	2
	3	3
	4	4
	5	5
	6	6
Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) Sederajat	1	7
	2	8
	3	9
Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) Sederajat	1	10
	2	11
	3	12
Diploma	I	13
	II	14
	III	15

D4/S1	I	13
	II	14
	III	15
	IV	16
S2/S3		17 - 18

Sumber : Badan Pusat Statistik

Berdasarkan data lama sekolah individu, maka rata-rata lama sekolah dapat dihitung dengan rumus berikut:

$$\bar{X} = \frac{\sum x_i}{n}$$

\bar{X} : rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas

x_i : lamanya sekolah individu usia 15 tahun ke atas

n : jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas.

2.2.13 Perhitungan Indeks Pengetahuan

Menurut Badan Pusat Statistik (2016), “Penghitungan indeks tunggal baik RLS maupun HLS dilakukan menggunakan rumus umum indeks tunggal dalam persamaan (1). Sementara, nilai indeks pengetahuan dihitung dengan memberikan bobot yang sama besar untuk kedua indikator”. Secara umum, rumus penghitungan indeks pengetahuan diilustrasikan sebagai berikut:

$$\text{Indeks Pengetahuan} = \frac{I_{RLS} + I_{HLS}}{2}$$

I_{RLS} = Indeks Rata – Rata Lama Sekolah

I_{HLS} = Indeks Harapan Sekolah

Rumus untuk penghitungan indeks rata-rata lama sekolah dan indeks angka melek huruf masing-masing dinyatakan sebagai berikut

$$I_{RLS} = \frac{(RLS - RLS_{min})}{(RLS_{mak} - RLS_{min})}$$

$$I_{HLS} = \frac{(HLS - HLS_{min})}{(HLS_{mak} - HLS_{min})}$$

I_{RLS} = Indeks rata-rata lama sekolah

RLS = Angka harapan hidup

RLS_{min} = Nilai minimum dari RLS, UNDP menetapkan sebesar 0 tahun

RLS_{mak} = Nilai maksimum dari RLS, UNDP menetapkan sebesar 15 tahun

I_{HLS} = Indeks harapan lama sekolah

HLS = Angka harapan lama sekolah

HLS_{min} = Nilai minimum dari HLS, UNDP menetapkan sebesar 0 tahun

HLS_{mak} = Nilai maksimum dari HLS, UNDP menetapkan sebesar 18 tahun

Nilai indeks berada di antara angka nol (0) dan satu (1), semakin mendekati nol menunjukkan keadaan yang semakin memburuk dan semakin mendekati satu menunjukkan keadaan yang semakin membaik. Untuk mempermudah penafsiran, nilai Indeks tersebut dinyatakan dalam satuan ratusan atau dikalikan 100. Semua nilai indeks tersebut tidak memiliki makna khusus ketika berdiri sendiri, tetapi ketika dibandingkan

dengan angka yang sama dari daerah lain atau daerah yang sama pada waktu yang berbeda dapat dilihat gambaran perbandingan pencapaian pembangunan di bidang kesehatan antarwilayah maupun antar waktu.

2.2.14 Perhitungan Indeks Pembangunan Manusia(IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator komposit yang dipilih dan direkomendasikan untuk mengkaji perbandingan pencapaian pembangunan manusia antar wilayah maupun perkembangan antar waktu. Badan Pusat Statistik (2016) “Mengatakan bahwa IPM menjadi indeks komposit atau gabungan yang merepresentasikan tiga dimensi pembangunan manusia yang paling mendasar yaitu dimensi kesehatan, pengetahuan dan kehidupan yang layak”. Berdasarkan nilai indeks yang mewakili ketiga dimensi tersebut maka nilai IPM pada level provinsi/kabupaten/kota dapat dihitung menggunakan formula rata-rata geometrik sebagai berikut:

$$IPM = \sqrt[3]{I_{kesehatan} \times I_{pengetahuan} \times I_{pendapatan}}$$

Nilai IPM berkisar antara 0 sampai 100. Semakin besar nilai IPM menunjukkan kualitas pembangunan manusia yang semakin baik. Nilai IPM dapat diklasifikasikan menjadi empat kategori, yakni:

1. IPM kelompok “rendah” dengan kriteria nilai $IPM < 60$
2. IPM kelompok “sedang” dengan kriteria $60 \leq \text{Nilai IPM} < 70$
3. IPM kelompok “tinggi” dengan kriteria $70 \leq \text{Nilai IPM} < 80$
4. IPM kelompok “sangat tinggi” dengan kriteria Nilai $IPM \geq 80$

“Tingkat kecepatan perkembangan IPM dalam suatu kurun waktu tertentu dapat diketahui menggunakan pendekatan pertumbuhan IPM. Semakin tinggi nilai pertumbuhan, maka semakin cepat IPM suatu wilayah mencapai nilai maksimalnya dan semakin rendah pertumbuhan maka semakin lambat mencapai nilai maksimal. Secara umum, pertumbuhan IPM menunjukkan perbandingan antara capaian yang telah ditempuh pada periode t dengan capaian pada periode sebelumnya (t-1)”. Formula penghitungannya adalah: (Badan Pusat Statistik, 2016)

$$\text{Pertumbuhan IPM} = \frac{(IPM_t - IPM_{t-1})}{IPM_{t-1}} \times 100$$

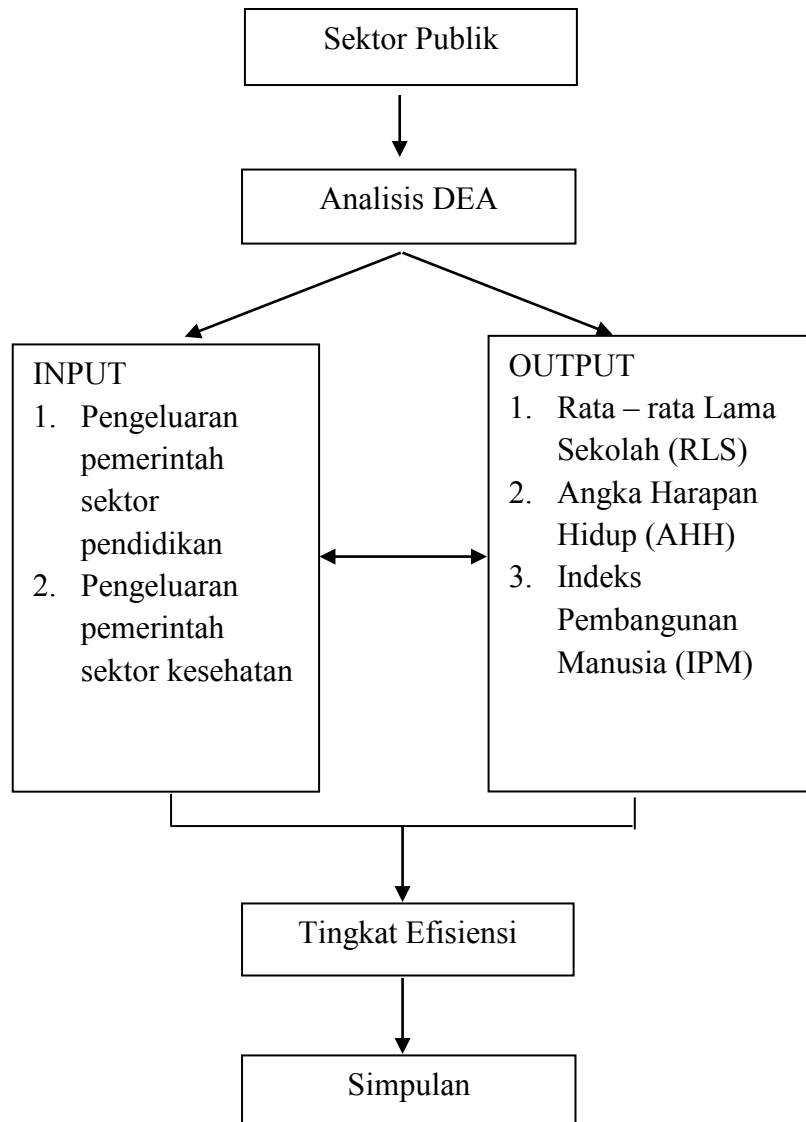
2.2.15 Efisiensi

Menurut Mardiasmo (2009) “Efisiensi merupakan pencapaian output yang maksimum dengan input tertentu atau penggunaan input yang terendah untuk mencapai output tertentu. Efisiensi merupakan perbandingan antara output/input yang dikaitkan dengan standar kinerja atau target yang telah ditetapkan. Pengukuran efisiensi menggunakan perbandingan antara output yang dihasilkan terhadap input yang digunakan (cost of output)”. Proses kegiatan dapat dikatakan efisien apabila suatu produk atau hasil kerja dapat dicapai dengan penggunaan sumber daya dan dana yang serendah – rendahnya (spending well). lebih lanjut Mardiasmo (2009) menyatakan bahwa “Efisiensi diukur dengan menggunakan rasio antara input dan output. Semakin besar output dibandingkan dengan input maka, semakin tinggi efisiensinya”.

Pengukuran kinerja sektor publik dilakukan untuk memenuhi tiga tujuan. Pertama, pengukuran kinerja sektor publik dimaksudkan untuk membantu memperbaiki kinerja pemerintah. Tujuan dari pengukuran kinerja dimaksudkan untuk dapat membantu pemerintah untuk mencapai tujuan dan sasaran program unit kerja, sehingga akan meningkatkan efisiensi dan efektifitas organisasi sektor publik. Kedua, ukuran kinerja publik digunakan untuk mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan.

Efisiensi dalam pengukuran belanja pemerintah didefinisikan sebagai suatu kondisi ketika realokasi sumber daya yang dilakukan tidak mungkin lagi mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. “Efisiensi pengeluaran pemerintah daerah diartikan ketika setiap rupiah yang dibelanjakan menghasilkan kesejahteraan optimal. Ketika kondisi tersebut terpenuhi maka dikatakan pengeluaran pemerintah telah mencapai tingkat yang efisien” (Kurnia, 2006)

2.3 Kerangka Pemikiran



BAB III

METOTOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang diterbitkan oleh instansi di daerah setempat. Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari Badan Pusat Statistik (BPS) berupa belanja atau pengeluaran pemerintah daerah pada sektor kesehatan, pengeluaran pemerintah pada sektor pendidikan, Rata – rata Lama Sekolah (RLS), Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan Angka Harapan Hidup (AHH).

3.2 Definisi Operasional Variabel

Metode analisis dengan menggunakan *Data Envelopment Analysis* (DEA) memerlukan data yang berupa input dan output suatu Unit Kegiatan Ekonomi (UKE). Variabel input dan output yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

A. Variabel Input

1. Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan

Pengeluaran pemerintahan yang bersumber dari rekening kas umum daerah yang mengurangi equitas dana lancar yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran pada sektor pendidikan.

2. Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan

Pengeluaran pemerintahan yang bersumber dari rekening kas umum daerah yang mengurangi equitas dana lancar yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran pada sektor kesehatan

B. Variabel Output

1. Rata – rata Lama Sekolah (RLS)

Didefinisikan sebagai lamanya seseorang mengikuti pendidikan formal yang dimulai dari masuk sekolah dasar (SD) sampai dengan kelas terakhir yang diselesaikan pada tingkat atau jenjang pendidikan terakhir yang ditempuh.

2. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Merupakan indikator komposit yang dipilih dan direkomendasikan untuk mengkaji perbandingan pencapaian pembangunan manusia antar wilayah maupun perkembangan antar waktu.

3. Angka Harapan Hidup (AHH)

Menyatakan perkiraan rata-rata usia atau tahun yang akan dijalani oleh sekelompok orang yang dilahirkan pada waktu tertentu (kohor yang sama) hingga akhir masa hidupnya, dengan asumsi pola mortalitasnya bersifat tetap

3.3 Metode Analisis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian *Data Envelopment Analysis* (DEA). Menurut Cooper, et al (1999) melihat teknik DEA sebagai “Such as mathematical programming which can handle large number of variables and constrains...” dengan demikian metode DEA dapat mengatasi keterbatasan metode rasio dan regresi yang tidak dapat menggunakan banyak input dan output. Penelitian ini menggunakan asumsi VRS (Variable return to scale) sehingga semua unit yang diukur akan menghasilkan perubahan pada berbagai tingkat output, selain itu memperhatikan bahwa suatu teknologi dapat juga kedalam VRS membuka kemungkinan bahwa skala produksi mempengaruhi efisiensi. Walaupun asumsi Constrain return to scale (CRS) sehingga penambahan satu input akan diikuti oleh penambahan satu output.

“Data Envelopment Analysis (DEA) merupakan alat analisis yang didasari teknik programasi linier untuk mengukur efisiensi relatif dari sekumpulan Unit Kegiatan Ekonomi yang dapat dibandingkan. Metode ini dirancang khusus untuk mengukur efisiensi dengan banyak input dan output, yang mana penggabungan input output tersebut tidak dapat digabungkan. Efisiensi relatif UKE adalah efisiensi suatu UKE dibanding UKE lain dalam sampel” (Dendawijaya, 2001). Penggunaan DEA sebagai alat analisis setiap sektor dapat menentukan pembobotan masing – masing dan menjamin bahwa pembobotan dipilih akan menghasilkan ukuran efisiensi yang terbaik.

3.4 Nilai Manajerial DEA

DEA memiliki beberapa nilai manajerial. Pertama, DEA menghasilkan efisiensi untuk setiap UKE, relatif terhadap UKE yang lain didalam sampel. Hasil dari angka efisiensi ini dapat digunakan untuk mengenali UKE yang membutuhkan perhatian dan merencanakan tindakan perbaikan UKE yang tidak/kurang efisien. Kedua, jika suatu UKE kurang efisien (efisien < 100%) maka DEA dapat menunjukkan sejumlah UKE yang memiliki efisiensi sempurna (efficient reference set, efisiensi = 100%) dan seperangkat angka pengganda (multipliers) yang dapat digunakan oleh Instansi untuk menyusun strategi perbaikan. Ketiga, DEA menyediakan metrik efisiensi silang. Efisiensi silang UKE A terhadap UKE B merupakan rasio dari output tertimbang dibagi input tertimbang yang dihitung dengan menggunakan tingkat input dan output UKE A dan bobot input dan output UKE B.

3.5 Formulasi DEA

“Secara umum formulasi dengan menggunakan DEA adalah, misalnya akan dilakukan perbandingan efisiensi dari sejumlah Unit Kegiatan Ekonomi (UKE) n . setiap UKE menggunakan m jenis input untuk menghasilkan s jenis input. Misalnya $X_{ij} > 0$ merupakan jumlah input i yang digunakan oleh UKE j , dan misalkan $Y_{rj} > 0$ merupakan jumlah output r yang dihasilkan oleh UKE j . Variabel keputusan (decision variabel) dari kasus tersebut adalah bobot yang harus diberikan pada setiap input dan output oleh UKE k . V_{ik} adalah bobot yang diberikan pada input i oleh unit kegiatan k dan U_{rk} adalah bobot yang diberikan pada output r oleh UKE k . Sehingga V_{ik} dan U_{rk} merupakan

variabel keputusan, yaitu variabel yang nilainya akan ditentukan melalui interaksi program linier fraksiona, satu formulasi program linier untuk setiap UKE dalam sampel. Fungsi tujuan (objective function) dari setiap program linier fraksioanal tersebut adalah rasio dari output tertimbang total (total weighted output) dari UKE k dibagi dengan input tertimbang totalnya” (Dendawijaya, 2001). Berikut ini formulasi fungsi tujuan :

$$\text{Memaksimumkan } Z_k = \frac{\sum_{r=1}^s U_{rk} \times Y_{rk}}{\sum_{i=1}^m V_{ik} \times X_{ik}}$$

Kriteria universalitas mensyaratkan unit kegiatan ekonomi k untuk memiliki bobot dengan batasan atau kendala bahwa tidak ada satu unit kegiatan ekonomi lain yang akan memiliki efisiensi lebih besar 1 atau 100%, jika unit kegiatan ekonomi lain tersebut menggunakan bobot yang dipilih oleh unit kegiatan ekonomi k sehingga formulasi selanjutnya adalah :

$$\frac{\sum_{r=1}^s U_{rk} \times Y_{rj}}{\sum_{i=1}^m V_{ik} \times X_{ij}} \leq 1 ; j = 1, \dots, n$$

Bobot yang dipilih tidak boleh bernilai negatif:

$$U_{rk} \geq 0 ; r = 1, \dots, s$$

$$V_{ik} \geq 0 ; r = 1, \dots, m$$

Program linear fraksional kemudian ditransformasikan ke dalam program linear biasa (*ordinary linear program*), dan metode simpleks dapat digunakan untuk menyelesaikannya. Transformasi program linear, yang disebut dengan DEA (*data envelopment analysis*), adalah sebagai berikut

$$\text{DEA memaksimumkan } Z_k = \sum_{r=1}^s U_{rk} \times Y_{rk}$$

Dengan batasan atau kendala :

$$[P_{kj}] \quad \sum_{r=1}^s U_{rk} \times Y_{rj} - \sum_{i=1}^m V_{ik} \times X_{ij} \leq 0 ; j = 1, \dots, n$$

$$[q_k] \quad \sum_{i=1}^m V_{ik} \times X_{ik} = 1$$

$$U_{rk} \geq 0 ; r = 1, \dots, s$$

$$V_{ik} \geq 0 ; i = 1, \dots, m$$

Rumus diatas mengasumsikan kedua teknologi Constan return to scale dimana :

Y_{rk} = Jumlah output r yang dihasilkan oleh sektor k

X_{ik} = Jumlah input i yang diperlukan oleh sektor k

Y_{rj} = Jumlah output r yang dihasilkan oleh sektor j

X_{ij} = Jumlah input i yang diperlukan oleh sektor j

s = Jumlah sektor yang dianalisis

m = Jumlah input yang digunakan

V_{ik} = Bobot tertimbang dari output r yang dihasilkan tiap sektor k

Z_k = Nilai yang dipotimalkan sebagai indikator efisien relatif dari sektor k

3.6 Kelebihan dan Kelemahan DEA

Metode ini dikembangkan oleh Charnes, Cooper dan Rhodes (1978) “untuk mengatasi kesulitan pengukuran efisiensi relatif dengan keberadaan *multiple* input dan output. DEA memiliki beberapa kelebihan dan kelemahan dibandingkan dengan teknik pengukuran kinerja lainnya”.

Kelebihan DEA antara lain:

- a. Dapat mengidentifikasi efisiensi dari berbagai Unit Kegiatan Ekonomi (UKE) dengan variasi variabel input dan output.

- b. Mampu mengidentifikasi sumber-sumber inefisiensi secara spesifik sehingga diperoleh informasi secara rinci pada masing-masing UKE
- c. DEA dapat memberi arah pada UKE yang tidak efisien untuk meningkatkan efisiensinya melalui kegiatan *benchmarking* terhadap UKE yang efisien (*Efficient Reference Set*).
- d. Dari hasil pertama dan kedua dapat disusun strategi pengembangan suatu UKE sehingga mencapai kinerja yang optimal.
- e. Jika menggunakan analisis rasio, tidak dapat memberi informasi yang konklusif mengenai UKE yang efisien, serta tidak dapat memberi arahan pada usaha peningkatan efisiensi.
- f. Analisis regresi memiliki kelemahan pada penggabungan output yang sejenis dan kualitasnya mungkin berbeda, serta pengukuran efisiensi dihitung secara relatif terhadap kinerja rata-rata. Sedangkan DEA dapat menghitung efisiensi secara relatif terhadap kemungkinan kinerja yang terbaik, dan tidak memerlukan penggabungan output.

Kelemahan DEA antara lain:

- a. Diperlukannya pemahaman yang mendalam terhadap variabel dan karakteristik UKE yang digunakan. Kesalahan peneliti dalam memahami karakteristik tersebut bisa berakibat pada kesalahan interpretasi.
- b. DEA mensyaratkan semua input dan output harus spesifik dan dapat diukur. Kesalahan dalam memasukkan input dan output yang valid akan memberikan hasil yang bias.

c. Model DEA sangat sensitif terhadap nilai ekstrim.

BAB IV

Analisis dan Pembahasan

4.1 Gambaran Umum

4.1.1 Belanja Daerah

Belanja daerah merupakan semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi equitas dana lancar yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Belanja daerah terdiri dari :

1. Belanja Tidak Langsung

Belanja tidak langsung merupakan belanja yang tidak terkait langsung dengan kegiatan yang dilaksanakan dan sukar diukur dengan capaian prestasi kerja yang ditetapkan. Kelompok belanja tidak langsung terdiri dari belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil provinsi/kabupaten/kota dan pemerintah desa, belanja bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintah desa, dan belanja tidak terduga.

2. Belanja Langsung

Belanja langsung adalah belanja yang terkait langsung dengan pelaksanaan kegiatan dan dapat diukur dengan capaian prestasi kerja yang telah ditetapkan. Belanja langsung meliputi : belanja pegawai, barang dan jasa serta belanja modal.

**Tabel 4. 1 Realisasi Total Belanja Menurut kabupaten/kota
Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2013 – 2015**

Kota/Kabupaten	Realisasi Total Belanja (Juta Rupiah)		
	2013	2014	2015
Kota Yogyakarta	1,232,911.93	1,336,633.01	1,539,699.34
Kab Bantul	1,387,719.17	1,700,351.28	1,933,302.50
Kab Kulon Progo	964,587.55	1,060,577.35	1,243,069.95
Kab Gunungkidul	1,180,155.60	1,267,067.51	1,586,001.08
Kab Sleman	1,693,528.30	1,896,477.38	2,328,751.92

Sumber : BPS D.I Yogyakarta

Berdasarkan data pada tabel diatas menunjukkan bahwa kabupten/kota dengan belanja daerah terbesar yaitu Kabupaten Sleman. Realisasi belanja Kabupaten Sleman mengalami peningkatan sejak tahun 2013 sebesar 1,693,528.30 sampai dengan tahun 2015 menjadi sebesar 2,328,751.92. Sedangkan realisasi belanja terendah adalah Kabupaten Kulonprogo pada tahun 2013 sebesar 964,587.60 mengalami peningkatan sebesar 1,243,069.95 pada tahun 2015.

4.1.2 Belanja Daerah Sektor Kesehatan

Belanja daerah sektor kesehatan merupakan pendapatan pemerintah yang dikeluarkan pada sektor kesehatan. Berikut ini data realisasi belanja sektor kesehatan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

**Tabel 4. 2 Realisasi Belanja Sektor Kesehatan Daerah Istimewa
Yogyakarta 2013 – 2015**

Kota/Kabupaten	Belanja Kesehatan (juta rupiah)		
	2013	2014	2015
Kota Yogyakarta	162127.9188	172692.9849	236035.9088
Kab Bantul	198166.2975	262364.2025	352441.0458
Kab Kulon Progo	132148.4944	176904.302	225990.1169
Kab Gunungkidul	120139.8401	149260.5527	193333.5317
Kab Sleman	325496.1393	639302.5248	667886.0507

Sumber : BPS D.I Yogyakarta diolah

Berdasarkan pada tabel diatas menunjukkan bahwa kabupaten/kota dengan belanja kesehatan terbesar adalah Kabupaten Sleman. Belanja kesehatan Kabupaten Sleman setiap tahunnya mengalami peningkatan sejak tahun 2013 sebesar 325496.1393 sampai dengan tahun 2015 menjadi sebesar 667886.0507. Sedangkan Kabupaten/kota dengan belanja kesehatan paling kecil adalah Kabupaten Gunung Kidul yang pada tahun 2013 sebesar 120139.8401 mengalami kenaikan pada tahun 2015 menjadi sebesar 193333.5317.

2.1.3 Belanja Daerah Sektor Pendidikan

Belanja daerah sektor pendidikan merupakan pendapatan pemerintah yang dikeluarkan pada sektor Pendidikan. Berikut ini data realisasi belanja sektor pendidikan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

**Tabel 4. 3 Realisasi Belanja Sektor Pendidikan
Daerah Istimewa Yogyakarta 2013 – 2015**

Kota/Kabupaten	Belanja Pendidikan (juta rupiah)		
	2013	2014	2015
Kota Yogyakarta	502288.3203	531445.2848	561220.4094
Kab Bantul	686920.9892	782501.6591	811407.0593
Kab Kulon Progo	463387.859	468775.1887	506426.6976
Kab Gunungkidul	621351.9234	646331.1369	718141.289
Kab Sleman	209658.8035	205198.8525	201437.0411

Sumber : BPS D.I Yogyakarta diolah

Berdasarkan pada tabel diatas menunjukkan bahwa kabupaten/kota dengan belanja pendidikan terbesar adalah Kabupaten Bantul. Belanja kesehatan Kabupaten Bantul setiap tahunnya mengalami peningkatan sejak tahun 2013 sebesar 686920.9892 sampai dengan tahun 2015 menjadi sebesar 811407.0593. Sedangkan Kabupaten/kota dengan belanja pendidikan paling kecil adalah Kabupaten Sleman yang mana pada tahun 2013 sebesar 209658.8035 mengalami kenaikan pada tahun 2015 menjadi sebesar 201437.0411.

2.1.4 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan dan sebagainya. IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak.

Tabel 4. 4 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Daerah Istimewa Yogyakarta

Kota/Kabupaten	IPM		
	2013	2014	2015
Kota Yogyakarta	80.51	83.78	84.56
Kab Bantul	76.01	71.11	77.99
Kab Kulon Progo	75.95	70.68	71.52
Kab Gunungkidul	71.64	67.03	67.41
Kab Sleman	79.97	80.73	81.2

Sumber : BPS D.I Yogyakarta

Berdasarkan pada tabel diatas menunjukkan bahwa kabupaten/kota dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tertinggi yaitu Kota Yogyakarta. Indeks Pembangunan Manusia Kota Yogyakarta setiap tahunnya mengalami peningkatan sejak tahun 2013 sebesar 80.51 sampai dengan tahun 2015 menjadi sebesar 84.56. Akan tetapi pada Kabupaten Bantul, Kulonprogo dan Gunung Kidul berfluktuatif pada tahun 2014 mengalami penurunan dan pada tahun 2015 mengalami kenaikan.

2.1.5 Angka Harapa Hidup (AHH)

Angka Harapan Hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Angka Harapan Hidup yang rendah di suatu daerah harus diikuti dengan program pembangunan kesehatan, dan program sosial lainnya termasuk kesehatan lingkungan, kecukupan gizi dan kalori termasuk program pemberantasan kemiskinan.

**Tabel 4. 5 Angka Harapan Hidup (AHH)
Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2013 - 2015**

Kota/Kabupaten	Angka Harapan Hidup (tahun)		
	2013	2014	2015
Kota Yogyakarta	73.71	74.05	74.25
Kab Bantul	71.62	73.24	73.44
Kab Kulon Progo	75.03	74.9	75
Kab Gunungkidul	71.36	73.39	73.69
Kab Sleman	75.79	74.47	74.57

Sumber : BPS D.I Yogyakarta

Rata – rata Angka Harapan Hidup di D.I Yogyakarta pada tahun 2013 – 2015 diatas adalah sebesar 73.9 tahun. Berdasarkan pada tabel diatas menunjukkan bahwa kabupaten/kota dengan Angka Harapan Hidup tertinggi pada tahun 2013 yaitu Kabupaten Sleman sebesar 75.79 tahun. Pada tahun 2014 dan 2015 Angka Harapan Hidup tertinggi yaitu Kabupaten Kulonprogo sebesar 74.9 tahun dan 75 tahun. Sedangkan Angka Harapan Hidup dibawah rata – rata dari tahun 2013 – 2015 adalah Kabupaten Bantul sebesar 71.62, 73.24, 73.44 dan Kabupaten Gunung Kidul sebesar 71.36, 73.39 dan 73.69.

2.1.6 Rata – rata Lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah menggambarkan tingkat pencapaian setiap penduduk dalam kegiatan bersekolah. Semakin tinggi angka lamanya bersekolah semakin tinggi jenjang pendidikan yang telah dicapai penduduk. Penduduk yang tamat SD diperhitungkan lama sekolah selama 6 tahun, tamat SMP diperhitungkan lama sekolah selama 9 tahun, tamat

SMA diperhitungkan lama sekolah selama 12 tahun tanpa memperhitungkan apakah pernah tinggal kelas atau tidak

**Tabel 4. 6 Rata – rata Lama Sekolah
Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2013 - 2015**

Kota/Kabupaten	Rata - rata lama sekolah (tahun)		
	2013	2014	2015
Kota Yogyakarta	11.56	11.39	11.41
Kab Bantul	9.02	8.74	9.08
Kab Kulon Progo	8.37	8.2	8.4
Kab Gunungkidul	7.79	6.45	6.46
Kab Sleman	10.55	10.28	10.3

Sumber : BPS D.I Yogyakarta

Berdasarkan pada tabel diatas menunjukkan bahwa kabupaten/kota dengan Rata – rata Lama Sekolah dari tahun 2013 – 2015 yang tertinggi yaitu Kota Yogyakarta sebesar 11.56, 11.39, 11.41. Kabupaten/kota dengan angka Rata – rata Lama Sekolah terendah yaitu di Kabupaten Gunung Kidul sebesar 7.79, 6.45, 6.46. Data diatas menunjukkan bahwa dari lima Kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta mengalami penurunan angka Rata – rata Lama Sekolah pada tahun 2014 dan kemudian meningkat kembali pada tahun 2015.

4.2 Analisis Data dan Pembahasan

Otonomi daerah menurut UU No.32 Tahun 2004, diartikan sebagai hak wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang – undangan. Otonomi daerah berimplikasi khusus bagi pemerintah daerah yaitu semakin meingkatnya biaya ekonomi

(high cost ekonomi), dan yang kedua adalah efisiensi dan efektifitas. Oleh karena itu desentralisasi membutuhkan dana yang memadai bagi pelaksanaan pembangunan di daerah (Handayani 2009).

Kebijakan fiskal merupakan suatu kebijakan yang dilakukan pemerintah untuk mengelola keuangannya. Melalui kebijakan ini pemerintah mengelola keuangan tersebut untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Variabel yang dipilih berdasarkan besarnya belanja daerah menurut fungsinya dan dampak terhadap dana yang dibelanjakan pemerintah daerah. Artinya variabel input dianggap sangat erat hubungannya dengan pencapaian variabel output.

Variabel input yang digunakan dalam penelitian ini meliputi :

1. Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan

Pengeluaran pemerintahan yang bersumber dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran pada sektor pendidikan.

2. Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan

Pengeluaran pemerintahan yang bersumber dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran pada sektor kesehatan

Sedangkan variabel output meliputi :

1. Rata – rata Lama Sekolah (RLS)

Didefinisikan sebagai lamanya seseorang mengikuti pendidikan formal yang dimulai dari masuk sekolah dasar (SD) sampai dengan kelas

terakhir yang diselesaikan pada tingkat atau jenjang pendidikan terakhir yang ditempuh.

2. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Merupakan indikator komposit yang dipilih dan direkomendasikan untuk mengkaji perbandingan pencapaian pembangunan manusia antar wilayah maupun perkembangan antar waktu.

3. Angka Harapan Hidup (AHH)

Menyatakan perkiraan rata-rata usia atau tahun yang akan dijalani oleh sekelompok orang yang dilahirkan pada waktu tertentu (kohor yang sama) hingga akhir masa hidupnya, dengan asumsi pola mortalitasnya bersifat tetap.

Pengukuran efisiensi berdasarkan pada programasi linier yang membandingkan input dan output. Penelitian ini dimulai dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2015. Dari hasil perhitungan dengan teknik DEA diperoleh tabel efisiensi untuk masing-masing Kabupaten/Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

Tabel 4. 7 Efisiensi Penggunaan Belanja Daerah Sektor Kesehatan dan Pendidikan Kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta

Kabupaten/kota	Tahun		
	2013	2014	2015
Kota Yogyakarta	100%	100%	100%
Kab Bantul	69.31%	64.41%	65.24%
Kab Kulon Progo	100%	100%	100%
Kab Gunungkidul	100%	100%	100%
Kab Sleman	100%	100%	100%

Berdasarkan data pada tabel diatas, kabupaten/kota yang mampu mencapai dan mempertahankan tingkat efisien (100%) dalam belanja sektor kesehatan dan pendidikan selama 3 tahun yaitu Kota Yogyakarta, Kabupaten Kulonprogo, Kabupaten Gunung Kidul,dan Kabupaten Sleman. Sedangkan Kabupaten Bantul tidak pernah efisien dalam membelanjakan dana dari APBD untuk sektor kesehatan dan pendidikan pada periode tahun 2013 – 2015.

Berdasarkan tabel 4.7, pada tahun 2013 tingkat efisiensi Kabupaten Bantul hanya mencapai 69.31% maka Kabupaten Bantul dapat mengurangi penggunaan dana setiap inputnya sebesar 30.69% dengan mempertahankan tingkat output yang sudah dihasilkan. Untuk mencapai tingkat efisiensi 100% maka Kabupaten Bantul seharusnya menggunakan danaBelanja Kesehatan sebesar Rp 137,349,068,800,- dan dana Belanja Pendidikan sebesar Rp 476,104,937,600,-. Oleh karena itu, selama tahun 2013 Kabupaten Bantul mengalami pemborosan penggunaan input dana Belanja Kesehatan sebesar Rp 60,817,236,700,- dan Belanja Pendidikan sebesar Rp 210,816,051,600,-.

Dengan demikian Kabupaten Bantul tidak mampu mencapai tingkat efisiensi dikarenakan terjadi pemborosan dalam penggunaan setiap inputnya.

Berdasarkan tabel 4.7, pada tahun 2014 Kabupaten/Kota dengan tingkat efisiensi paling rendah (tidak efisien) yaitu Kabupaten Bantul yang hanya mencapai 64.41% maka Kabupaten Bantul dapat mengurangi penggunaan dana setiap inputnya sebesar 35.59% dengan mempertahankan tingkat output yang sudah dihasilkan. Untuk mencapai tingkat efisiensi 100% maka Kabupaten Bantul seharusnya menggunakan dana Belanja Kesehatan sebesar Rp168,988,782,800,- dan dana Belanja Pendidikan sebesar Rp 504,009,318,600,-. Oleh karena itu, selama tahun 2014 Kabupaten Bantul mengalami pemborosan penggunaan input dana Belanja Kesehatan sebesar Rp 93,375,419,700,- dan Belanja Pendidikan sebesar Rp 278,492,340,500,-. Dengan demikian Kabupaten Bantul tidak mampu mencapai tingkat efisiensi dikarenakan terjadi pemborosan dalam penggunaan setiap inputnya.

Berdasarkan tabel 4.7, pada tahun 2015 Kabupaten/Kota dengan tingkat efisiensi paling rendah (tidak efisien) yaitu Kabupaten Bantul yang hanya mencapai 65.24% maka Kabupaten Bantul dapat mengurangi penggunaan dana setiap inputnya sebesar 34.76% dengan mempertahankan tingkat output yang sudah dihasilkan. Untuk mencapai tingkat efisiensi 100% maka Kabupaten Bantul seharusnya menggunakan dana Belanja Kesehatan sebesar Rp 229,932,538,200,- dan dana Belanja Pendidikan sebesar Rp 529,361,965,500,-. Oleh karena itu, selama tahun 2015 Kabupaten Bantul mengalami pemborosan penggunaan input dana Belanja Kesehatan sebesar

Rp 122,508,508,000,- dan Belanja Pendidikan sebesar Rp 282,045,093,800,-. Dengan demikian Kabupaten Bantul tidak mampu mencapai tingkat efisiensi dikarenakan terjadi pemborosan dalam penggunaan setiap inputnya.

Inefisiensi yang terjadi setiap tahunnya terhadap Kabupaten Bantul dikarenakan pemborosan penggunaan input. Pada tabel 4.8 di bawah ini akan menjelaskan pemborosan yang menyebabkan inefisiensi pada Kabupaten Bantul.

Tabel 4. 8 Penggunaan Input yang Efisien pada Tingkat Output yang Dihasilkan dan Pemborosan (Juta Rupiah)

Tahun	Kabupaten /Kota	Penggunaan input yang efisien		Pemborosan	
		BK	BP	BK	BP
2013	Bantul	137349.0608	476104.9376	60817.2367	210816.0516
2014	Bantul	168988.7828	504009.3186	93375.41967	278492.3405
2015	Bantul	229932.5382	529361.9655	122508.5075	282045.0938

Sumber :BPS diolah

Catatan :Lampiran II diolah

Keterangan :BK = Belanja Kesehatan (juta rupiah)

BP = Belanja Pendidikan (juta rupiah)

Pemborosan yang dimaksud adalah penggunaan input yang besar dan tidak maksimal sehingga menghasilkan output yang tidak maksimal juga, atau input yang digunakan untuk keperluan yang tidak dapat mempengaruhi output.

Berdasarkan perhitungan *Data Envelopment Analysis* (DEA), juga memperlihatkan bahwa kabupaten/kota tidak efisien mempunyai nilai *efficient reference set* atau kabupaten/kota lain yang dijadikan acuan/*benchmark* dalam meningkatkan efisiensinya. Berikut adalah ringkasan

dari efisiensi, *efficient reference set* dan *multiplier* dari seluruh kabupaten/kota di Yogyakarta.

Pada tabel 4.9 di bawah ini dapat dilihat bahwa Kabupaten/Kota yang tingkat input dan outputnya tidak efisien dapat mengacu pada *efficient reference set*, sehingga dapat ditentukan input dan output provinsi yang efisien untuk provinsi yang tidak efisien.

Tabel 4. 9 Multiplier, Efisiensi dan Efficient Reference Set dari Seluruh Kabupaten/Kota yang Tidak Efisien pada Tahun 2013 - 2015

Tahun	Kabupaten/Kota	Efisiensi	Efficient Reference	Multiplier
2013	Bantul	69.31%	Yogyakarta	0.241
			Kulon Progo	0.695
			Gunung Kidul	0.052
2014	Bantul	64.41%	Yogyakarta	0.287
			Kulon Progo	0.557
			Gunung Kidul	0.140
2015	Bantul	65.24%	Yogyakarta	0.576
			Kulon Progo	0.406
			Sleman	0.003

Sumber : BPS diolah

Catatan : Lampiran III diolah

Berdasarkan tabel 4.9 di atas, pada tahun 2013 tingkat efisiensi Kabupaten Bantul adalah sebesar 69.31% dengan *benchmark* yaitu Kota Yogyakarta, Kabupaten Kulonprogo dan Kabupaten Sleman yang masing-masing memiliki nilai *multiplier* 0.241, 0.695 dan 0,052. *Multiplier* tersebut berfungsi sebagai angka pengganda yang dinamis sebagai dasar untuk menyesuaikan input dan output di Kabupaten Bantul agar menjadi efisien. Dari hasil pengolahan data menggunakan *Data Envelopment Analysis* (DEA),

Kabupaten Bantul untuk mencapai tingkat efisiensi 100% jika dibandingkan dengan Kota Yogyakarta, Kabupaten Kulonprogo dan Kabupaten Sleman maka dapat menggunakan dana Belanja Kesehatan sebesar Rp 137,349,068,800,- dan dana Belanja Pendidikan sebesar Rp 476,104,937,600,-. Dengan menggunakan masing-masing input yang telah dikurangi maka Kabupaten Bantul dapat mencapai tingkat efisiensi 100%.

Berdasarkan tabel 4.9 di atas, pada tahun 2014 tingkat efisiensi Kabupaten Bantul adalah sebesar 64.41% dengan *benchmark* yaitu Kota Yogyakarta, Kabupaten Kulonprogo dan Kabupaten Gunung Kidul yang masing-masing memiliki nilai *multiplier* 0.287, 0.557 dan 0.140. *Multiplier* tersebut berfungsi sebagai angka pengganda yang dinamis sebagai dasar untuk menyesuaikan input dan output di Kabupaten Bantul agar menjadi efisien. Dari hasil pengolahan data menggunakan *Data Envelopment Analysis* (DEA), Kabupaten Bantul untuk mencapai tingkat efisiensi 100% jika dibandingkan dengan Kota Yogyakarta, Kabupaten Kulonprogo dan Kabupaten Sleman maka dapat menggunakan dana Belanja Kesehatan sebesar Rp168,988,782,800,- dan dana Belanja Pendidikan sebesar Rp 504,009,318,600,-. Dengan menggunakan masing-masing input yang telah dikurangi maka Kabupaten Bantul dapat mencapai tingkat efisiensi 100%.

Berdasarkan tabel 4.9 di atas, pada tahun 2015 tingkat efisiensi Kabupaten Bantul adalah sebesar 65.24% dengan *benchmark* yaitu Kota Yogyakarta, Kabupaten Kulonprogo dan Kabupaten Sleman yang masing-masing memiliki nilai *multiplier* 0.567, 0,406 dan 0,003. *Multiplier* tersebut

berfungsi sebagai angka pengganda yang dinamis sebagai dasar untuk menyesuaikan input dan output di Kabupaten Bantul agar menjadi efisien. Dari hasil pengolahan data menggunakan *Data Envelopment Analysis* (DEA), Kabupaten Bantul untuk mencapai tingkat efisiensi 100% jika dibandingkan dengan Kota Yogyakarta, Kabupaten Kulonprogo dan Kabupaten Sleman maka dapat menggunakan dana Belanja Kesehatan sebesar Rp 229,932,538,200,- dan dana Belanja Pendidikan sebesar Rp 529,361,965,500,-. Dengan menggunakan masing-masing input yang telah dikurangi maka Kabupaten Bantul dapat mencapai tingkat efisiensi 100%.

Tabel 4. 10 Penggunaan Input yang Efisien pada Tingkat Output yang Dihasilkan dengan Perbandingan Kabupaten/Kota yang Efisien (Benchmark)

Tahun	Kabupaten/Kota	Penggunaan input yang efisien (Juta Rupiah)	
		Belanja Kesehatan	Belanja Pendidikan
2013	Bantul	137349.0608	476104.9376
2014	Bantul	168988.7828	504009.3186
2015	Bantul	229932.5382	529361.9655

Sumber : BPS diolah

Catatan : Lampiran III diolah

Kabupaten Bantul merupakan satu-satunya Kabupaten/Kota yang tidak mencapai tingkat efisiensi 100% dibandingkan dengan keempat kabupaten/kota lainnya. Pada tahun 2013 Kabupaten Bantul mencapai tingkat efisiensi 69.31%, tahun 2014 mengalami penurunan tingkat efisiensi menjadi 64.41%, kemudian pada tahun 2015 mampu meningkat tipis menjadi 65,24%.

BAB V

SIMPULAN DAN IMPLIKASI

5.1 Simpulan

Belanja kesehatan dan belanja pendidikan merupakan variabel input yang sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat karena output dari belanja kesehatan dan belanja pendidikan akan meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Angka Harapan Hidup (AHH) dan Rata – rata lama sekolah yang mana semua itu sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan hasil pengolahan data menggunakan *Data Envelopment Analysis* (DEA) terhadap tingkat efisiensi belanja pemerintah daerah kabupaten/kota di Yogyakarta pada tahun 2013-2015, dapat disimpulkan bahwa dari tahun 2013 – 2015 terdapat empat Kabupaten/kota yang telah mencapai tingkat efisien (100%), kabupaten/kota tersebut yaitu Kota Yogyakarta, Kabupaten Gunung Kidul, Kabupaten Kulonprogo, dan Kabupaten Sleman. Sedangkan kabupaten/kota yang inefisien (belum mencapai 100%) adalah Kabupaten Bantul yang hanya mampu meraih tingkat efisiensi pada tahun 2013 sebesar 69.31%, tahun 2014 sebesar 64.41% dan pada tahun 2015 sebesar 65.24%.

5.2 Implikasi

Kabupaten/kota yang telah mencapai tingkat efisiensi maksimal yaitu Kota Yogyakarta, Kabupaten Gunung Kidul, Kabupaten Kulonprogo dan Kabupaten Sleman diharapkan mampu mempertahankan efisiensinya sehingga akan menghasilkan sumber daya manusia yang memiliki daya saing dan bisa mengurangi ketimpangan antar kabupaten/kota yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta, yang pada akhirnya akan menciptakan kesejahteraan masyarakat secara umum. Sedangkan untuk Kabupaten Bantul yang dari tahun 2013 hingga tahun 2015 yang tidak pernah efisien harus terus berbenah khususnya dalam penggunaan dana belanja pendidikan dan kesehatan. Sesuai dengan hasil analisis DEA Kabupaten Bantul bisa mengacu pada kabupaten/kota yang efisien untuk mendapatkan tingkat efisiensi 100%.

Hal yang perlu dilakukan supaya penggunaan belanja daerah sektor kesehatan dan pendidikan terarah dan bisa menghasilkan output yang baik di Daerah Istimewa Yogyakarta adalah mengawasi dan mengevaluasi penggunaan setiap input agar tidak terjadi penyelewengan penggunaan dana ataupun pemborosan yang dapat mengakibatkan inefisien. Selain itu, diperlukan juga penyusunan rencana penggunaan dana input terhadap sektor-sektor yang tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan dan bisa mengacu pada kabupaten/kota yang efisien seperti tahun 2013 acuannya Kota Yogyakarta, Kabupaten Kulonprogo, dan Kabupaten Gunung Kidul. Pada tahun 2014 mengacu pada Kota Yogyakarta, Kabupaten Kulonprogo dan Kabupaten Gunung Kidul. Pada tahun 2015 bisa mengacu pada Kota

Yogyakarta, Kabupaten Kulonprogo dan Kabupaten Sleman supaya pada masa yang akan datang mampu mencapai tingkat efisiensi 100%.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Priyo Hari (2009). Fenomena Ilusi Fiskal Dalam Kinerja Anggaran Pemerintah. Jurnal Akuntansi dan Keuangan, Vol.6, No.1.
- Amanda, Rica. (2010), Analisis Efisiensi Teknis Bidang Pendidikan Dalam Implementasi Model Kota Layak (studi kasus 14 kabupaten/kota di provinsi jawa tengah tahun 2008), Skripsi Sarjana Fakultas Ekonomi. Universitas Diponegoro.
- Akbar, R.A. (2010), “Analisis Efisiensi Baitul Mal Wa Tamwil Dengan Menggunakan Data Envelopment Analysis (DEA) : Studi pada BMT Bina Ummat Sejahtera di Jawa Tengah pada tahun 2009, Skripsi Sarjana Fakultas Ekonomi, Universitas Diponegoro. Semarang.
- Badan Pusat Statistik Daerah Istimewa Yogyakarta (2015), Statistik Keuangan Daerah Istimewa Yogyakarta 2015 – 2016, Diakses 13 Oktober 2017, dari <http://www.yogyakarta.bps.go.id>
- Badan Pusat Statistik Daerah Istimewa Yogyakarta (2016), Indeks Pembangunan Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta 2016, Diakses 23 Oktober 2017, dari <http://www.yogyakarta.bps.go.id>
- Cooper, W.W. et al (1999), A Comprehensive Text With Model, Application, Reference and DEA-Solver Software, Kluwer Academic Publisher. Boston USA
- Desi, B.D. (2010), “Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah atas Pendidikan, Kesehatan dan Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Periode 1969-2009”, Skripsi Sarjana, Fakultas Ekonomi, Universitas Diponegoro. Semarang
- Dumairy (1996), Perekonomian Indonesia, Erlangga, Jakarta
- Dumairy (1999), Perekonomian Indonesia, Erlangga, Jakarta

- Dumairy (2002), *Perekonomian Indonesia*, Erlangga, Jakarta
- Fahriant, F.Y. dan Carolina, F. (2012). “Analisis Efisiensi Anggaran Belanja Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas”. *Jurnal Manajemen dan Akuntansi*. Volume 13, Nomor 1
- Halim, Abdul (2001), *Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah*, Unit Penerbit dan Percetakan (UPP) AMPYKPN, Yogyakarta.
- Handayani, A. (2009). “Analisis Pengaruh Transfer Pemerintah Pusat Terhadap Pengeluaran Daerah dan Upaya Pajak (*TaxEffort*) Daerah (Studi Kasus: Kabupaten/Kota di Jawa Tengah).” Skripsi (Tidak Dipublikasikan), Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan, Universitas Diponegoro. Semarang.
- Indriati, N.E. (2014). “Analisis Efisien Belanja Daerah di Kabupaten Sumbawa (Studi Kasus Bidang Pendidikan dan Kesehatan)”. *Jurnal Ekonomi Studi Pembangunan*. 6 (2): 192-205
- Khusaini, Muhamad (2006), *Ekonomi Publik : Desentralisasi Fiskal dan Pembangunan Daerah*, BPFE Unbraw, Malang.
- Kurnia, A.S. 2006. “Model Pengukuran Kinerja Dan Efisiensi sektor Publik Metode Free Disposable Hull (FDH)”. *Jurnal Ekonomi Pembangunan* Vol. 11 No. 2.
- Lestari, T. (2013). ”Analisis Efisiensi Belanja Daerah Di Jawa Timur (Studi Kasus Bidang Pendidikan dan Kesehatan Tahun 2009-2011)”. *Jurnal Ilmiah: Universitas Brawijaya Malang*
- Mankiw, N.G. (2008), *Makroekonomi edisi keenam*. Erlangga, Jakarta
- Mangkoesebroto, G, (1993), *Ekonomi Publik, Edisi-III*, BPFE, Yogyakarta.
- Mardiasmo. (2009), *Akuntansi Sektor Publik*, Andi, Yogyakarta
- Mills, A. Dan Gilson, L (terj). (1990). *Ekonomi Kesehatan untuk Negara-Negara Berkembang* Jakarta. Dian Rakyat, Jakarta.

Pemendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Puspitasari, E.D dan Pujiati, A. (2017). “Analisis Efisiensi Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan di Provinsi Jawa Tengah”. *Economics Development Analisis Journal*. Volume 6, Nomor 1.

Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Departemen Komunikasi dan Informatika. Jakarta.

Rondonuwu R.H, Tinangon J.J dan Budiarmo N (2015). “Analisis Efisiensi dan Efektifitas Pengelolaan Keuangan Daerah pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa”. *Jurnal EMBA*, Volume 3, Hal 23-32.

Sukirno, S. (2004), Pengantar Teori Makroekonom, PT Raja Grafindo Persada. Jakarta

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Anggaran Pendidikan.

Website <http://pendidikan-diy.go.id/dikti/home>, Diakses pada tanggal 14 Oktober 2017.

Yatiman N. dan Pujiyono A. (2013). “Analisis Efisiensi Teknis Anggaran Belanja Sektor Kesehatan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008-2010”. *Jurnal of Economics*. Volume 2, Nomor 1, Halaman 1-13.

LAMPIRAN I

Data Input dan Output Kabupaten/Kota Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Tahun 2013 – 2015

Kabupaten/ Kota	2013				
	Input		Output		
	Belanja Kesehatan (Juta rupiah)	Belanja Pendidikan (Juta rupiah)	Angka harapan hidup (Tahun)	IPM	Rata - rata lama sekolah (Tahun)
Kota Yogyakarta	162127.9188	502288.3203	73.71	80.51	11.56
Kab Bantul	198166.2975	686920.9892	71.62	76.01	9.02
Kab Kulon Progo	132148.4944	463387.859	75.03	75.95	8.37
Kab Gunungkidul	120139.8401	621351.9234	71.36	71.64	7.79
Kab Sleman	325496.1393	209658.8035	75.79	79.97	10.55

Kabupaten/Kota	2014				
	Input		Output		
	Belanja Kesehatan (Juta rupiah)	Belanja Pendidikan (Juta rupiah)	Angka harapan hidup (Tahun)	IPM	Rata - rata lama sekolah (Tahun)
Kota Yogyakarta	172692.9849	531445.2848	74.05	83.78	11.39
Kab Bantul	262364.2025	782501.6591	73.24	71.11	8.74
Kab Kulon Progo	176904.302	468775.1887	74.9	70.68	8.2
Kab Gunungkidul	149260.5527	646331.1369	73.39	67.03	6.45
Kab Sleman	639302.5248	205198.8525	74.47	80.73	10.28

Kabupaten/Kota	2015				
	Input		Output		
	Belanja Kesehatan (Juta rupiah)	Belanja Pendidikan (Juta rupiah)	Angka harapan hidup (Tahun)	IPM	Rata - rata lama sekolah (Tahun)
Kota Yogyakarta	236035.9088	561220.4094	74.25	84.56	11.41
Kab Bantul	352441.0458	811407.0593	73.44	77.99	9.08
Kab Kulon Progo	225990.1169	506426.6976	75	71.52	8.4
Kab Gunungkidul	193333.5317	718141.289	73.69	67.41	6.46
Kab Sleman	667886.0507	201437.0411	74.57	81.2	10.3

Sumber: BPS Yogyakarta

LAMPIRAN II

Penggunaan Input yang Efisien pada Tingkat Output yang Dihasilkan dan Pemborosan

Tahun 2013									
Kabupaten/kota	Input		Efisien	Tingkat Efisien	Penggunaan Input		Mengurangi Setiap Input	Pemborosan	
	Input 1	Input 2			Input 1	Input 2		Input 1	Input 2
Kota Yogyakarta	162127.9188	502288.3203	100%	100%	-	-	-	-	-
Kab Bantul	198166.2975	686920.9892	100%	69.31%	137349.0608	476104.9376	30.69%	60817.2367	210816.0516
Kab Kulon Progo	132148.4944	463387.859	100%	100%	-	-	-	-	-
Kab Gunungkidul	120139.8401	621351.9234	100%	100%	-	-	-	-	-
Kab Sleman	325496.1393	209658.8035	100%	100%	-	-	-	-	-

Tahun 2014									
Kabupaten/kota	Input		Efisien	Tingkat Efisien	Penggunaan Input		Mengurangi Setiap Input	Pemborosan	
	Input 1	Input 2			Input 1	Input 2		Input 1	Input 2
Kota Yogyakarta	172692.9849	531445.2848	100%	100%	-	-	-	-	-
Kab Bantul	262364.2025	782501.6591	100%	64.41%	168988.7828	504009.3186	35.59%	93375.4197	278492.3405
Kab Kulon Progo	176904.302	468775.1887	100%	100%	-	-	-	-	-
Kab Gunungkidul	149260.5527	646331.1369	100%	100%	-	-	-	-	-
Kab Sleman	639302.5248	205198.8525	100%	100%	-	-	-	-	-

Tahun 2015									
Kabupaten/kota	Input		Efisien	Tingkat Efisien	Penggunaan Input		Mengurangi Setiap Input	Pemborosan	
	Input 1	Input 2			Input 1	Input 2		Input 1	Input 2
Kota Yogyakarta	236035.9088	561220.4094	100%	100%	-	-	-	-	-
Kab Bantul	352441.0458	811407.0593	100%	65.24%	229932.5382	529361.9655	34.76%	122508.508	282045.0938
Kab Kulon Progo	225990.1169	506426.6976	100%	100%	-	-	-	-	-
Kab Gunungkidul	193333.5317	718141.289	100%	100%	-	-	-	-	-
Kab Sleman	667886.0507	201437.0411	100%	100%	-	-	-	-	-

Sumber : BPS Diolah

Catatan : Lampiran I Diolah

Input 1 : Belanja Kesehatan (juta rupiah)

Input 2 : Belanja Pendidikan (juta rupiah)

LAMPIRAN III

Penggunaan Input yang Efisien Pada Tingkat Output yang Dihasilkan Dengan Perbandingan Kabupaten yang Efisien (*Benchmark*)

Tahun 2013 - 2015

Tahun 2013								
Kabupaten/kota	Input		Kabupaten/kota	Efisiensi	Efisiensi Reference	Multiplier	Penggunaan Input	
	Input 1	Input 2					Input 1	Input 2
Kota Yogyakarta	162127.9188	502288.3203	Bantul	69.31%	Yogyakarta	0.241	137349.0608	476104.9376
Kab Bantul	198166.2975	686920.9892						
Kab Kulon Progo	132148.4944	463387.859			Kulon Progo	0.695		
Kab Gunungkidul	120139.8401	621351.9234						
Kab Sleman	325496.1393	209658.8035			Gunung Kidul	0.052		

Tahun 2014								
Kabupaten/kota	Input		Kabupaten/kota	Efisiensi	Efisiensi Reference	Multiplier	Penggunaan Input	
	Input 1	Input 2					Input 1	Input 2
Kota Yogyakarta	172692.9849	531445.2848	Bantul	64.41%	Yogyakarta	0.287	168988.7828	504009.3186
Kab Bantul	262364.2025	782501.6591						
Kab Kulon Progo	176904.302	468775.1887			Kulon Progo	0.557		
Kab Gunungkidul	149260.5527	646331.1369						
Kab Sleman	639302.5248	205198.8525			Gunung Kidul	0.140		

Tahun 2015								
Kabupaten/kota	Input		Kabupaten/kota	Efisiensi	Efisiensi Reference	Multiplier	Penggunaan Input	
	Input 1	Input 2					Input 1	Input 2
Kota Yogyakarta	236035.9088	561220.4094	Bantul	65.24%	Yogyakarta	0.576	229932.5382	529361.9655
Kab Bantul	352441.0458	811407.0593						
Kab Kulon Progo	225990.1169	506426.6976			Kulon Progo	0.406		
Kab Gunungkidul	193333.5317	718141.289						
Kab Sleman	667886.0507	201437.0411			Sleman	0.003		

Sumber : BPS Diolah

Catatan : Lampiran I Diolah

Input 1 : Belanja Kesehatan (juta rupiah)

Input 2 : Belanja Pendidikan (juta rupiah)

LAMPIRAN IV

Table of efficiencies (radial) (2013)

69.31 BANTUL 100.00 GUNUNGKIDUL 100.00 KULONPROGO
 100.00 SLEMAN 100.00 YOGYAKARTA

Table of peer units

Peers for Unit BANTUL efficiency 69.31% radial

BANTUL	LAMBDA	YOGYAKARTA	KULONPROGO	GUNUNGKIDU
ACTUAL		0.241	0.695	0.052
198166.3 -BK		39145.5	91906.5	6287.7
686921.0 -BP		121276.5	322276.7	32519.2
71.6 +AHH		17.8	52.2	3.7
76.0 +IPM		19.4	52.8	3.7
9.0 +RLS		2.8	5.8	0.4

Peers for Unit GUNUNGKIDUL efficiency 100.00% radial

GUNUNGKIDU GUNUNGKIDUL

ACTUAL	LAMBDA	GUNUNGKIDUL
		1.000
120139.8 -BK		120139.8
621351.9 -BP		621351.9
71.4 +AHH		71.4
71.6 +IPM		71.6
7.8 +RLS		7.8

Peers for Unit KULONPROGO efficiency 100.00% radial

KULONPROGO KULONPROGO

ACTUAL	LAMBDA	KULONPROGO
		1.000
132148.5 -BK		132148.5
463387.9 -BP		463387.9
75.0 +AHH		75.0
75.9 +IPM		75.9
8.4 +RLS		8.4

Peers for Unit SLEMAN efficiency 100.00% radial

SLEMAN SLEMAN

ACTUAL	LAMBDA	SLEMAN
		1.000
325496.1 -BK		325496.1
209658.8 -BP		209658.8
75.8 +AHH		75.8
80.0 +IPM		80.0
10.6 +RLS		10.6

Peers for Unit YOGYAKARTA efficiency 100.00% radial

YOGYAKARTA	YOGYAKARTA
ACTUAL LAMBDA	1.000
162127.9 -BK	162127.9
502288.3 -BP	502288.3
73.7 +AHH	73.7
80.5 +IPM	80.5
11.6 +RLS	11.6

Table of target values

Targets for Unit BANTUL efficiency 69.31% radial

VARIABLE	ACTUAL	TARGET	TO GAIN	ACHIEVED
-BK	198166.3	137339.7	30.7%	69.3%
-BP	686921.0	476072.4	30.7%	69.3%
+AHH	71.6	73.7	2.9%	97.2%
+IPM	76.0	76.0	0.0%	100.0%
+RLS	9.0	9.0	0.0%	100.0%

Targets for Unit GUNUNGKIDUL efficiency 100.00% radial

VARIABLE	ACTUAL	TARGET	TO GAIN	ACHIEVED
-BK	120139.8	120139.8	0.0%	100.0%
-BP	621351.9	621351.9	0.0%	100.0%
+AHH	71.4	71.4	0.0%	100.0%
+IPM	71.6	71.6	0.0%	100.0%
+RLS	7.8	7.8	0.0%	100.0%

Targets for Unit KULONPROGO efficiency 100.00% radial

VARIABLE	ACTUAL	TARGET	TO GAIN	ACHIEVED
-BK	132148.5	132148.5	0.0%	100.0%
-BP	463387.9	463387.9	0.0%	100.0%
+AHH	75.0	75.0	0.0%	100.0%
+IPM	75.9	75.9	0.0%	100.0%
+RLS	8.4	8.4	0.0%	100.0%

Targets for Unit SLEMAN efficiency 100.00% radial

VARIABLE	ACTUAL	TARGET	TO GAIN	ACHIEVED
-BK	325496.1	325496.1	0.0%	100.0%
-BP	209658.8	209658.8	0.0%	100.0%
+AHH	75.8	75.8	0.0%	100.0%
+IPM	80.0	80.0	0.0%	100.0%
+RLS	10.6	10.6	0.0%	100.0%

Targets for Unit YOGYAKARTA efficiency 100.00% radial

VARIABLE	ACTUAL	TARGET	TO GAIN	ACHIEVED
-BK	162127.9	162127.9	0.0%	100.0%
-BP	502288.3	502288.3	0.0%	100.0%
+AHH	73.7	73.7	0.0%	100.0%

+IPM	80.5	80.5	0.0%	100.0%
+RLS	11.6	11.6	0.0%	100.0%

Table of virtual I/Os

Virtual I/Os for Unit BANTUL efficiency 69.31% radial

VARIABLE	VIRTUAL IOs	IO	WEIGHTS
-BK	93.59%		0.00000
-BP	6.41%		0.00000
+AHH	0.00%		0.00000
+IPM	34.01%		0.00447
+RLS	35.29%		0.03913

Virtual I/Os for Unit GUNUNGKIDUL efficiency 100.00% radial

VARIABLE	VIRTUAL IOs	IO	WEIGHTS
-BK	87.43%		0.00001
-BP	12.57%		0.00000
+AHH	74.85%		0.01049
+IPM	12.57%		0.00176
+RLS	12.57%		0.01614

Virtual I/Os for Unit KULONPROGO efficiency 100.00% radial

VARIABLE	VIRTUAL IOs	IO	WEIGHTS
-BK	66.67%		0.00001
-BP	33.33%		0.00000
+AHH	33.33%		0.00444
+IPM	33.33%		0.00439
+RLS	33.33%		0.03982

Virtual I/Os for Unit SLEMAN efficiency 100.00% radial

VARIABLE	VIRTUAL IOs	IO	WEIGHTS
-BK	66.67%		0.00000
-BP	33.33%		0.00000
+AHH	33.33%		0.00440
+IPM	33.33%		0.00417
+RLS	33.33%		0.03160

Virtual I/Os for Unit YOGYAKARTA efficiency 100.00% radial

VARIABLE	VIRTUAL IOs	IO	WEIGHTS
-BK	35.01%		0.00000
-BP	64.99%		0.00000
+AHH	31.35%		0.00425
+IPM	31.35%		0.00389
+RLS	37.30%		0.03227

Table of efficiencies (radial) (2014)

64.41 BANTUL 100.00 GUNUNGKIDUL 100.00 KULONPROGO
 100.00 SLEMAN 100.00 YOGYAKARTA

Table of peer units

Peers for Unit BANTUL efficiency 64.41% radial

BANTUL	LAMBDA	YOGYAKARTA	KULONPROGO	GUNUNGKIDUL
ACTUAL		0.287	0.557	0.140
262364.2 -BK		49598.3	98559.4	20832.4
782501.7 -BP		152633.9	261170.7	90208.9
73.2 +AHH		21.3	41.7	10.2
71.1 +IPM		24.1	39.4	9.4
8.7 +RLS		3.3	4.6	0.9

Peers for Unit GUNUNGKIDUL efficiency 100.00% radial

GUNUNGKIDUL	LAMBDA	GUNUNGKIDUL
ACTUAL		1.000
149260.5 -BK		149260.5
646331.1 -BP		646331.1
73.4 +AHH		73.4
67.0 +IPM		67.0
6.4 +RLS		6.4

Peers for Unit KULONPROGO efficiency 100.00% radial

KULONPROGO	LAMBDA	KULONPROGO
ACTUAL		1.000
176904.3 -BK		176904.3
468775.2 -BP		468775.2
74.9 +AHH		74.9
70.7 +IPM		70.7
8.2 +RLS		8.2

Peers for Unit SLEMAN efficiency 100.00% radial

SLEMAN	LAMBDA	SLEMAN
ACTUAL		1.000
639302.5 -BK		639302.5
205198.9 -BP		205198.9
74.5 +AHH		74.5
80.7 +IPM		80.7
10.3 +RLS		10.3

Peers for Unit YOGYAKARTA efficiency 100.00% radial

YOGYAKARTA	LAMBDA	YOGYAKARTA
ACTUAL		1.000
172693.0 -BK		172693.0
531445.3 -BP		531445.3
74.1 +AHH		74.1
83.8 +IPM		83.8
11.4 +RLS		11.4

Table of target values

Targets for Unit BANTUL efficiency 64.41% radial

VARIABLE	ACTUAL	TARGET	TO GAIN	ACHIEVED
-BK	262364.2	168990.2	35.6%	64.4%
-BP	782501.7	504013.5	35.6%	64.4%
+AHH	73.2	73.2	0.0%	100.0%
+IPM	71.1	72.8	2.4%	97.7%
+RLS	8.7	8.7	0.0%	100.0%

Targets for Unit GUNUNGKIDUL efficiency 100.00% radial

VARIABLE	ACTUAL	TARGET	TO GAIN	ACHIEVED
-BK	149260.5	149260.5	0.0%	100.0%
-BP	646331.1	646331.1	0.0%	100.0%
+AHH	73.4	73.4	0.0%	100.0%
+IPM	67.0	67.0	0.0%	100.0%
+RLS	6.4	6.4	0.0%	100.0%

Targets for Unit KULONPROGO efficiency 100.00% radial

VARIABLE	ACTUAL	TARGET	TO GAIN	ACHIEVED
-BK	176904.3	176904.3	0.0%	100.0%
-BP	468775.2	468775.2	0.0%	100.0%
+AHH	74.9	74.9	0.0%	100.0%
+IPM	70.7	70.7	0.0%	100.0%
+RLS	8.2	8.2	0.0%	100.0%

Targets for Unit SLEMAN efficiency 100.00% radial

VARIABLE	ACTUAL	TARGET	TO GAIN	ACHIEVED
-BK	639302.5	639302.5	0.0%	100.0%
-BP	205198.9	205198.9	0.0%	100.0%
+AHH	74.5	74.5	0.0%	100.0%
+IPM	80.7	80.7	0.0%	100.0%
+RLS	10.3	10.3	0.0%	100.0%

Targets for Unit YOGYAKARTA efficiency 100.00% radial

VARIABLE	ACTUAL	TARGET	TO GAIN	ACHIEVED
-BK	172693.0	172693.0	0.0%	100.0%
-BP	531445.3	531445.3	0.0%	100.0%
+AHH	74.1	74.1	0.0%	100.0%

+IPM	83.8	83.8	0.0%	100.0%
+RLS	11.4	11.4	0.0%	100.0%

Table of virtual I/Os

Virtual IOs for Unit BANTUL efficiency 64.41% radial

VARIABLE	VIRTUAL IOs	IO	WEIGHTS
-BK	74.57%		0.00000
-BP	25.43%		0.00000
+AHH	60.19%		0.00822
+IPM	0.00%		0.00000
+RLS	4.22%		0.00482

Virtual IOs for Unit GUNUNGKIDUL efficiency 100.00% radial

VARIABLE	VIRTUAL IOs	IO	WEIGHTS
-BK	88.89%		0.00001
-BP	11.11%		0.00000
+AHH	77.79%		0.01060
+IPM	11.11%		0.00166
+RLS	11.11%		0.01722

Virtual IOs for Unit KULONPROGO efficiency 100.00% radial

VARIABLE	VIRTUAL IOs	IO	WEIGHTS
-BK	19.96%		0.00000
-BP	80.04%		0.00000
+AHH	61.95%		0.00827
+IPM	19.03%		0.00269
+RLS	19.03%		0.02320

Virtual IOs for Unit SLEMAN efficiency 100.00% radial

VARIABLE	VIRTUAL IOs	IO	WEIGHTS
-BK	66.52%		0.00000
-BP	33.48%		0.00000
+AHH	33.33%		0.00448
+IPM	33.33%		0.00413
+RLS	33.33%		0.03243

Virtual IOs for Unit YOGYAKARTA efficiency 100.00% radial

VARIABLE	VIRTUAL IOs	IO	WEIGHTS
-BK	33.33%		0.00000
-BP	66.67%		0.00000
+AHH	33.33%		0.00450
+IPM	33.33%		0.00398
+RLS	33.33%		0.02927

Table of efficiencies (radial) (2015)

65.24 BANTUL 100.00 GUNUNGKIDUL 100.00 KULONPROGO
 100.00 SLEMAN 100.00 YOGYAKARTA

Table of peer units

Peers for Unit BANTUL efficiency 65.24% radial

BANTUL	LAMBDA	YOGYAKARTA	KULONPROGO	SLEMAN
ACTUAL		0.576	0.406	0.003
352441.0 -BK		135950.0	91647.6	2317.3
811407.1 -BP		323247.2	205375.4	698.9
73.4 +AHH		42.8	30.4	0.3
78.0 +IPM		48.7	29.0	0.3
9.1 +RLS		6.6	3.4	0.0

Peers for Unit GUNUNGKIDUL efficiency 100.00% radial

GUNUNGKIDU	LAMBDA	GUNUNGKIDU
ACTUAL		1.000
193333.5 -BK		193333.5
718141.3 -BP		718141.3
73.7 +AHH		73.7
67.4 +IPM		67.4
6.5 +RLS		6.5

Peers for Unit KULONPROGO efficiency 100.00% radial

KULONPROGO	LAMBDA	KULONPROGO
ACTUAL		1.000
225990.1 -BK		225990.1
506426.7 -BP		506426.7
75.0 +AHH		75.0
71.5 +IPM		71.5
8.4 +RLS		8.4

Peers for Unit SLEMAN efficiency 100.00% radial

SLEMAN	LAMBDA	SLEMAN
ACTUAL		1.000
667886.1 -BK		667886.1
201437.0 -BP		201437.0
74.6 +AHH		74.6
81.2 +IPM		81.2
10.3 +RLS		10.3

Peers for Unit YOGYAKARTA efficiency 100.00% radial

YOGYAKARTA		YOGYAKARTA
ACTUAL	LAMBDA	1.000
236035.9	-BK	236035.9
561220.4	-BP	561220.4
74.3	+AHH	74.3
84.6	+IPM	84.6
11.4	+RLS	11.4

Table of target values

Targets for Unit BANTUL efficiency 65.24% radial

VARIABLE	ACTUAL	TARGET	TO GAIN	ACHIEVED
-BK	352441.0	229914.9	34.8%	65.2%
-BP	811407.1	529321.4	34.8%	65.2%
+AHH	73.4	73.4	0.0%	100.0%
+IPM	78.0	78.0	0.0%	100.0%
+RLS	9.1	10.0	10.3%	90.7%

Targets for Unit GUNUNGKIDUL efficiency 100.00% radial

VARIABLE	ACTUAL	TARGET	TO GAIN	ACHIEVED
-BK	193333.5	193333.5	0.0%	100.0%
-BP	718141.3	718141.3	0.0%	100.0%
+AHH	73.7	73.7	0.0%	100.0%
+IPM	67.4	67.4	0.0%	100.0%
+RLS	6.5	6.5	0.0%	100.0%

Targets for Unit KULONPROGO efficiency 100.00% radial

VARIABLE	ACTUAL	TARGET	TO GAIN	ACHIEVED
-BK	225990.1	225990.1	0.0%	100.0%
-BP	506426.7	506426.7	0.0%	100.0%
+AHH	75.0	75.0	0.0%	100.0%
+IPM	71.5	71.5	0.0%	100.0%
+RLS	8.4	8.4	0.0%	100.0%

Targets for Unit SLEMAN efficiency 100.00% radial

VARIABLE	ACTUAL	TARGET	TO GAIN	ACHIEVED
-BK	667886.1	667886.1	0.0%	100.0%
-BP	201437.0	201437.0	0.0%	100.0%
+AHH	74.6	74.6	0.0%	100.0%
+IPM	81.2	81.2	0.0%	100.0%
+RLS	10.3	10.3	0.0%	100.0%

Targets for Unit YOGYAKARTA efficiency 100.00% radial

VARIABLE	ACTUAL	TARGET	TO GAIN	ACHIEVED
-BK	236035.9	236035.9	0.0%	100.0%
-BP	561220.4	561220.4	0.0%	100.0%
+AHH	74.3	74.3	0.0%	100.0%

+IPM	84.6	84.6	0.0%	100.0%
+RLS	11.4	11.4	0.0%	100.0%

Table of virtual I/Os

Virtual IOs for Unit BANTUL efficiency 65.24% radial

VARIABLE	VIRTUAL IOs	IO	WEIGHTS
-BK	25.71%		0.00000
-BP	74.29%		0.00000
+AHH	29.07%		0.00396
+IPM	36.16%		0.00464
+RLS	0.00%		0.00000

Virtual IOs for Unit GUNUNGKIDUL efficiency 100.00% radial

VARIABLE	VIRTUAL IOs	IO	WEIGHTS
-BK	85.24%		0.00000
-BP	14.76%		0.00000
+AHH	70.48%		0.00956
+IPM	14.76%		0.00219
+RLS	14.76%		0.02285

Virtual IOs for Unit KULONPROGO efficiency 100.00% radial

VARIABLE	VIRTUAL IOs	IO	WEIGHTS
-BK	25.97%		0.00000
-BP	74.03%		0.00000
+AHH	63.74%		0.00850
+IPM	18.13%		0.00253
+RLS	18.13%		0.02158

Virtual IOs for Unit SLEMAN efficiency 100.00% radial

VARIABLE	VIRTUAL IOs	IO	WEIGHTS
-BK	66.67%		0.00000
-BP	33.33%		0.00000
+AHH	33.33%		0.00447
+IPM	33.33%		0.00411
+RLS	33.33%		0.03236

Virtual IOs for Unit YOGYAKARTA efficiency 100.00% radial

VARIABLE	VIRTUAL IOs	IO	WEIGHTS
-BK	33.33%		0.00000
-BP	66.67%		0.00000
+AHH	33.33%		0.00449
+IPM	33.33%		0.00394
+RLS	33.33%		0.02921